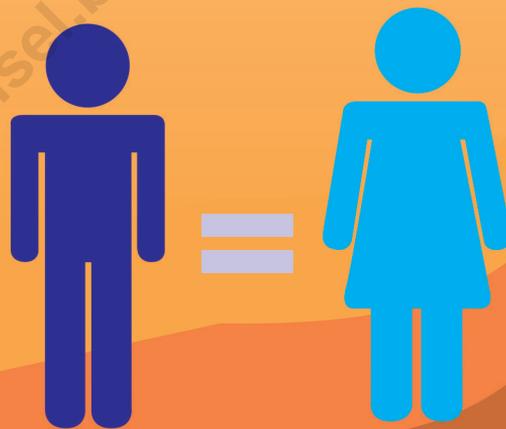


INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

PROVINSI
SULAWESI SELATAN

2017



INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

PROVINSI
SULAWESI SELATAN

2017



INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

PROVINSI SULAWESI SELATAN

2017

ISBN : 978-623-7581-03-1
Katalog BPS : 3102017.73
Nomor Publikasi : 73550.1922
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : viii + 60 halaman

Naskah :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik – Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar Kulit :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik – Provinsi Sulawesi Selatan

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

*Dilarang Mengumumkan, Mendistribusikan, Mengomunikasikan,
dan/atau Menggandakan Sebagian atau Seluruh isi Buku ini Untuk
Tujuan Komersial Tanpa Izin Tertulis dari Badan Pusat Statistik*

TIM PENYUSUN

**INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
PROVINSI SULAWESI SELATAN
2017**

Pengarah

Yos Rusdiansyah

Penanggungjawab

Didik Nursetyohadi

Editor

Joko Siswanto

Penulis

Wuri Wahyuni

Desain Cover dan Layout

Muhammad Ilham Mubarak

<https://sulsel.bps.go.id>

Kata Pengantar

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pembangunan manusia berbasis gender di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu dapat juga dilihat komponen capaian pembangunan manusia menurut jenis kelamin.

Kami mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak, untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Makassar, Oktober 2019



Yos Rusdiansyah

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan



Daftar Isi

v	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
vii	DAFTAR TABEL
viii	DAFTAR GAMBAR
x	DAFTAR LAMPIRAN
1	BAB I
	PENDAHULUAN
3	1.1. Konsep Pembangunan Manusia
6	1.2. Konsep Pembangunan Gender
7	1.3. Pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG)
7	1.4. Variabel dalam Indeks Pembangunan Gender
19	BAB II
	GENDER DALAM RANAH MASYARAKAT
22	2.1. Kependudukan
24	2.2. Bidang Kesehatan
28	2.3. Bidang Pendidikan
31	2.4. Ketenagakerjaan
35	BAB III
	KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI SELATAN
37	3.1. Status Pembangunan Gender di Sulawesi Selatan
41	3.2. Posisi IPG Sulawesi Selatan di Indonesia
43	3.3. Pembangunan Gender di Kabupaten/Kota
45	BAB IV
	DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI SELATAN
47	4.1. Konsep Pemberdayaan Gender
48	4.2. IDG Sulawesi Selatan
52	4.3. Capaian Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota
55	LAMPIRAN

Daftar Tabel

- 7 : Tabel 1.1 Dimensi dan Indikator Pembentuk IPG
- 9 : Tabel 1.2 Konversi Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
- 9 : Tabel 1.3 Konversi Partisipasi Sekolah
- 12 : Tabel 1.4 Komoditas Penyumbang Penghitungan Paritas Daya Beli
- 23 : Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2017(dalam Jiwa)
- 28 : Tabel 2.2 Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 (%)
- 29 : Tabel 2.3 Angka Partisipasi Kasar Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 (%)
- 29 : Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 (%)
- 34 : Tabel 2.5 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun 2017
- 42 : Tabel 3.1 Tabel UHH, RLS, dan PPP di Pulau Sulawesi Tahun 2017
- 48 : Tabel 4.1 Dimensi dan Indikator Pembentuk IDG
- 50 : Tabel 4.2 Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan 2017

Daftar Gambar

- 3 Gambar 1.1 Framework Pembangunan
- 11 Gambar 1.2 Komoditas Perhitungan Paritas Daya Beli pada IPM
- 14 Gambar 1.3 Alur Perhitungan Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan
- 14 Gambar 1.4 Daftar Paket Komoditi Makanan dan Nonmakanan yang dipergunakan dalam Perhitungan PP untuk IPM Metode Baru
- 17 Gambar 1.5 Rumus Perhitungan Indeks IPM Metode Baru
- 18 Gambar 1.6 Gambaran Perhitungan IPM
- 21 Gambar 2.1 Peta Sulawesi Selatan
- 22 Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan, 2010-2017 (jiwa)
- 23 Gambar 2.3 Piramida Penduduk Tahun 2017
- 25 Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2017 (%)
- 25 Gambar 2.5 Persentase Penduduk Laki-laki yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kota dan Desa Tahun 2017 dan 2017 (%)
- 26 Gambar 2.6 Persentase Penduduk Perempuan yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kota dan Desa Tahun 2017 dan 2017 (%)
- 27 Gambar 2.7 Persentase Penduduk yang berobat Jalan Sebulan Terakhir, Tahun 2017 (%)
- 30 Gambar 2.8 Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017
- 31 Gambar 2.9 Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017
- 32 Gambar 2.10 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2017 (%)
- 33 Gambar 2.11 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2017 (%)
- 33 Gambar 2.12 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2017 (%)
- 34 Gambar 2.13 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2017 (%)
- 38 Gambar 3.1 Perkembangan IPG, IPM Laki-Laki, dan IPM Perempuan di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017
- 38 Gambar 3.2 Perkembangan UHH Laki-laki, UHH Perempuan dan Total UHH di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017 (Tahun)

Daftar Gambar

- 39 : **Gambar 3.3** Perkembangan HLS Laki-laki, HLS Perempuan dan Total HLS di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017 (Tahun)
- 40 : **Gambar 3.4** Perkembangan RLS Laki-laki, RLS Perempuan dan Total RLS di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017 (Tahun)
- 41 : **Gambar 3.5** Perkembangan PPP Laki-laki, PPP Perempuan dan Total PPP di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017 (Juta Rupiah)
- 42 : **Gambar 3.6** IPG Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2017
- 43 : **Gambar 3.7** IPG Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017
- 49 : **Gambar 4.1** Perkembangan IDG Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017
- 49 : **Gambar 4.2** Perkembangan Indeks Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017
- 50 : **Gambar 4.3** Perkembangan Indeks Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017
- 51 : **Gambar 4.4** Perkembangan Indeks Perempuan dalam Distribusi Pendapatan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017
- 52 : **Gambar 4.5** IDG Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017
- 52 : **Gambar 4.6** Indeks Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017
- 53 : **Gambar 4.7** Indeks Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017
- 53 : **Gambar 4.8** Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Daftar Lampiran

- 57 : Lampiran 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sulawesi Selatan Tahun 2017
- 58 : Lampiran 2 Komponen IPG Sulawesi Selatan
- 59 : Lampiran 3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulawesi Selatan Beserta Komponen, 2017

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

<https://sulselipps.go.id>

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konsep Pembangunan Manusia

Penduduk merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dapat menjadi pedang bermata dua, menjadi berkah jika pertumbuhan penduduk dibarengi dengan kualitas yang mumpuni, menjadi musibah jika pertumbuhan penduduk hanya sebatas kuantitas. Penduduk juga memegang peranan penting dalam pembangunan, integrasi penduduk dan pembangunan menjadi kajian penting.

Pada *International Conference on Population and Development* (ICPD) di Cairo pada 1994 yang dihadiri lebih dari 180 negara menghasilkan kesepakatan bahwa: integrasi antara penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan; pemberdayaan perempuan dan hak individu serta partisipasinya dalam pembangunan; setiap keluarga/pasangan berhak memiliki kehidupan kesehatan reproduksi yang baik, termasuk di dalamnya Keluarga Berencana; dan peningkatan pelayanan kesehatan dasar, termasuk di dalamnya kesehatan ibu dan anak serta penanggulangan virus HIV/AIDS.

Proses pembangunan dan kependudukan merupakan suatu proses yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Kedua proses ini terjadi secara terus menerus membentuk suatu siklus pembangunan. Karena pada prinsipnya, pembangunan adalah suatu proses tanpa akhir, terus berkembang menuju kearah yang lebih baik. *Framework* pembangunan dan hubungan antara kependudukan dengan pembangunan ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 *Framework* Pembangunan

Pada dekade sebelum Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh UNDP, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja, sehingga pembangunan pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.

Manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya, untuk itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut diperlukan untuk memperbesar kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Peningkatan kemampuan dasar dapat dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan penduduk. Hal tersebut penting karena dapat direfleksikan dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.

Paradigma pembangunan manusia yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dengan demikian bahwa penduduk merupakan tujuan akhir dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pembangunan manusia tersebut terdapat empat hal pokok yang harus diperhatikan :

1. **Produktivitas**, masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.
2. **Pemerataan**, masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.
3. **Kesinambungan**, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang akan tetapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup harus dilengkapi.
4. **Pemberdayaan**, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka (HDR, 1995).

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak anti terhadap pertumbuhan. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat

untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Hubungan antara pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi berlangsung melalui dua jalur. Jalur **pertama**; melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Besarnya pengeluaran tersebut merupakan indikasi tentang komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Jalur **kedua**, melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga, dalam hal ini besarnya dan komposisi untuk nutrisi keluarga, biaya pelayanan kesehatan, dan pendidikan anggota rumah tangga. Jembatan yang menghubungkan antara pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi adalah melalui penciptaan kesempatan kerja.

Upaya pembangunan manusia dalam peningkatan kemampuan dasar dan keterampilan tenaga kerja akan mempengaruhi penciptaan output yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan masyarakat. Selain itu, faktor kelembagaan, distribusi sumber daya dan modal sosial merupakan hal yang tidak kalah penting.

Penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dilakukan oleh pemerintah ditempuh secara makro melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pengendalian inflasi, menekan tingkat pengangguran, dan memberikan kredit modal pada usaha kecil mikro dan menengah.

Hingga saat ini, masih relatif sedikit indikator statistik yang merupakan proksi untuk mengukur kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI), yang merupakan pendekatan untuk mengukur pencapaian pembangunan yang dititik beratkan pada kesejahteraan manusia. Sejak saat diperkenalkan oleh UNDP pada 1990, IPM menjadi pusat perhatian berbagai pihak, baik kalangan masyarakat umum, pemerintah, politikus maupun kalangan akademis. IPM menjadi populer karena cara perhitungannya yang sederhana, yaitu hanya merupakan rata-rata dari indikator kesehatan; pendidikan; dan pendapatan, tetapi nilai yang dihasilkan sangat berarti bagi pemerintah dalam menterjemahkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai. Jadi menurut indeks ini, pembangunan dikatakan berhasil jika memberikan dampak yang baik pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan tingkat daya beli masyarakat. Ukuran ini bersifat universal dan sangat humanis karena mencerminkan pencapaian harapan setiap orang dalam kehidupannya. Data yang diperoleh dari internet menunjukkan bahwa IPM lebih populer dibandingkan *Human Development Report* (HDR) dan *World Development Report* (WDR).

1.2. Konsep Pembangunan Gender

Gender merupakan serangkaian karakteristik yang terikat dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin serta berbagai hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Istilah gender mulai diperkenalkan oleh ilmuwan sosial. Konsep perbedaan pada maksud gender tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan. Apabila terjadi ketidakadilan, dapat merugikan kerugian baik pihak laki-laki maupun perempuan. Sehingga, kesetaraan gender merupakan hak yang sewajarnya terjadi agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Pembangunan manusia adalah perluasan kebebasan yang nyata yang dinikmati oleh manusia dan melekat pada berbagai aspek, yaitu pemberdayaan, partisipasi, dan kerjasama, keamanan, keberlanjutan, dan kesetaraan, (Sen, 1989). Jika melihat komposisi jumlah penduduk, sumber daya manusia laki-laki dan perempuan hampir sama secara kuantitas. Jika terjadi kesetaraan gender dalam hal hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama, niscaya akan memperkuat kemampuan suatu wilayah untuk berkembang. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender sangatlah penting untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Pengukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis gender menjadi hal yang sangat diperlukan. Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan SDGs yang ke-5, yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Kesetaraan ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan, dan variabel sosial ekonomi lainnya, selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Searah dengan target SDGs, meski tidak dicantumkan secara khusus, pemerintah dalam program Nawacita juga turut mencanangkan beberapa kebijakan gender yang tersirat dalam 3 agenda Nawacita, diantaranya:

1. Cita ke-2 yaitu “Membuat Pemerintah selalu Hadir dengan Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya”, kebijakan yang termaktub adalah meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan manusia.
2. Cita ke-4, yaitu “Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya”, kebijakannya adalah melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal.
3. Cita ke-5, yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Indonesia”, kebijakan terkait adalah peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi salah satu alat dalam melihat keberhasilan pemerintah dalam implementasi program-program yang telah dicanangkan terkait gender dalam nawacita maupun SDGs.

1.3. Pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Sejarah Pengukuran pembangunan gender di Indonesia dimulai sejak *United Nations Development Program* (UNDP) mengeluarkan laporan berkala yaitu *Human Development Report* (HDR) di tahun 1990 yang mencantumkan *Human Development Index* (HDI) atau IPM (BPS, 2015), lima tahun kemudian, UNDP memasukkan konsep HDI dengan kesetaraan gender (*Gender Equality*). Sejak tahun 1995 UNDP telah mengukur pembangunan berbasis gender. Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan gender dalam aspek pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang dihitung oleh BPS bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sejak tahun 2009. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM tetapi dipisahkan dalam porsi laki-laki dan perempuan. Adanya perubahan metodologi pengukuran GDI oleh UNDP di tahun 2010, menyebabkan penyesuaian pula di negara-negara yang melakukan penghitungan IPG. Pada tahun 2015, Indonesia merilis IPG metode baru dengan backcasting data hingga tahun 2010.

Tabel 1.1 Dimensi dan Indikator Pembentuk IPG

Dimensi	Indikator
Umur panjang dan sehat	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (e_0), Laki-laki & Perempuan
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan 2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki & Perempuan
Kehidupan yang layak	Perkiraan pendapatan; Laki-laki & Perempuan

1.4 Variabel dalam Indeks Pembangunan Gender

Metodologi dan konsep penghitungan IPM dan IPG adalah sama, yang mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010. IPG merupakan penghitungan IPM yang dipisah secara laki-laki dan perempuan. Beberapa variabel yang telah disebutkan sebelumnya, dijabarkan secara umum sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup (AHH) Laki-Laki dan Perempuan

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) atau *life Expectancy* (e_0) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil proyeksi SP2010. Dasar penghitungan AHH adalah menggunakan Angka Kematian Bayi laki-laki dan perempuan atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dengan pola model *West Coale-demeny Trussell equations* dan proyeksi IMR.

Untuk menghitung AHH, data yang digunakan adalah data kematian 0 tahun dan kelahiran level provinsi dari hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035. Sedangkan untuk level kabupaten/kota, harus tersedia data selisih Anak Lahir Hidup (ALH) dengan Anak Masih Hidup (AMH) dari hasil SP210 untuk kabupaten/kota dan provinsi. Selanjutnya, kematian 0 tahun untuk kabupaten/kota diperoleh dengan rumus:

$$Kematian0th_{kab} = \frac{M_{kab}(SP2020)}{M_{prov}} \times Kematian0th_{prov} \text{ (Pr oyeksi)}$$

$$IMR_{kab} = \frac{Kematian0th_{kab}}{Kelahiran_{kab}}$$

Keterangan

$Kematian0th_{kab}$	= Kematian bayi 0 tahun Kabupaten/Kota
$M_{kab}(SP2020)$	= Selisih ALH dan AMH Kabupaten/Kota hasil SP2010
M_{prov}	= Selisih ALH dan AMH Provinsi
$Kematian0th_{prov} \text{ (Pr oyeksi)}$	= Kematian bayi 0 tahun Provinsi hasil proyeksi
IMR_{kab}	= Angka Kematian Bayi Kabupaten/Kota
$Kelahiran_{kab}$	= Jumlah Kelahiran Bayi di Kabupaten/Kota

Setelah diperoleh angka kematian 0 tahun untuk kabupaten/kota dengan menggunakan rumus diatas, selanjutnya dengan menggunakan program aplikasi Mortpack ditransformasi menjadi AHH. Atau secara matematik dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IMR_{kab} \rightarrow e_{kab}^0$$

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Laki-laki dan Perempuan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan dalam menjalani pendidikan formal. Untuk nilai RLS, diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

RLS digunakan pada IPM metode lama dan metode baru untuk mengukur

dimensi pendidikan. Tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam definisi RLS ini. Dimana pada IPM metode lama, RLS dihitung untuk penduduk usia 15 tahun keatas. Sedangkan pada IPM metode baru, cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Untuk menghitung RLS, menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Selanjutnya, pada keterangan pendidikan diperlukan skor/konversi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan seseorang yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Selain konversi pada ijazah terakhir yang dimiliki, untuk menghitung RLS perlu memperhatikan partisipasi sekolah untuk penduduk usai 25 tahun keatas. Walaupun diasumsikan bahwa pada usia 25 tahun, penduduk baik laki-laki maupun perempuan telah menyelesaikan pendidikannya, tetapi masih ada kemungkinan bahwa penduduk usia 25 tahun keatas dan masih sekolah. Sehingga

Tabel 1.2 Konversi Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Ijazah	Konversi Tahun Lama Sekolah (Tahun)
Tidak Punya Ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMLB/MA/SMK/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

Tabel 1.3 Konversi Partisipasi Sekolah

Keterangan	Lama Sekolah
Masih bersekolah di SD s.d S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir-1
Masih bersekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1 Ket.: Karena di SUSENAS, kode kelas untuk yang sedang kuliah S2=6 dan kuliah S3=7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1
Tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

untuk partisipasi sekolah dapat dilihat pada tabel 1.3.

Setelah menghitung lama sekolah untuk penduduk usia 25 tahun keatas berdasarkan aturan konversi diatas, selanjutnya RLS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RLS_{25+} = \frac{1}{n_{25+}} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Keterangan

RLS_{25+} = Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 25 tahun keatas

$\text{lama sekolah penduduk}_i$ = Total lama sekolah penduduk usia ke i disuatu wilayah

n_{25+} = Jumlah Penduduk Usia 25 tahun ke atas

c. Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki-Laki Dan Perempuan

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan.

Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam. Faktor koreksi untuk siswa yang sekolah di pesantren dirumuskan sebagai:

$$\text{Rasio Santri Mukim} = \frac{\text{Jumlah bermukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}}$$

$\text{Jumlah santri sekolah dan mukim} = \text{rasio santri mukim} \times \text{Jumlah santri sekolah}$

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}}$$

Sedangkan nilai HLS dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

- FK = Faktor Koreksi Pesantren
 E_i^t = Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t
 P_i^t = Jumlah Penduduk Usia i pada tahun t
 i = Penduduk usia ($a, a+1, \dots, n$)

d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Laki-Laki Dan Perempuan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita ini dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Penghitungan paritas daya beli pada IPM metode baru ini menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan.



Gambar 1.2 Komoditas Perhitungan Paritas Daya Beli pada IPM

Pada IPM metode lama, untuk menghitung paritas daya beli hanya menggunakan 27 komoditas. Dimana share 27 komoditas tersebut terus menurun dari 37,52 % pada tahun 1996 menjadi 24,66 % pada tahun 2012. Sedangkan pada IPM metode baru, penghitungan paritas daya beli dipilih 96 komoditas yang memberikan *share* sebesar 73,63 persen.

Selanjutnya, teknis penghitungan pendapatan perkapita yang disesuaikan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dari Susenas. Langkah Pertama, menghitung pengeluaran per kapita (per anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga. Langkah Kedua, menghitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota. Langkah Ketiga, menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan.

$$Y'_i = \frac{(\text{rata-rata pengeluaran per kapita per bulan}) \times 12}{1000}$$

2. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan (riil). Menghitung nilai riil rata-rata pengeluaran per kapita per tahun (atas dasar tahun 2012) dengan rumus:

Tabel 1.4 Komoditas Penyumbang Penghitungan Paritas Daya Beli

Kelompok	Share Kelompok	Terpilih	
		Share	Jumlah Item
Makanan	47	40	66
Padi-padian	8	8	2
Umbi-umbian	0	0	2
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	4	2	7
Daging	2	2	3
Telur dan Susu	3	2	4
Sayur-sayuran	4	2	7
Kacang-kacangan	1	1	2
Buah-buahan	2	1	7
Minyak dan Lemak	2	2	3
Bahan Minuman	2	1	3
Bumbu-bumbuan	1	0	3
Konsumsi Lainnya	1	1	1
Makanan dan Minuman Jadi	12	11	19
Tembakau dan Sirih	6	6	3
Non Makanan	53	34	30
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	21	16	10
Aneka Barang dan Jasa	19	14	12
Pakaian, Alas Kaki, Tutup Kepala	4	3	4
Barang Tahan lama	6	1	4
Pajak, Pungutan, Asuransi	2	0	0
Keperluan, Pesta, Upacara/Kenduri	2	0	0
Total	100	74	96

$$Y_t^* = \frac{Y_t'}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Keterangan

Y_t^* = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Y_t' = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$ = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

- Menghitung Paritas Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP). Langkah Pertama, menghitung harga rata-rata komoditas terpilih. Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, harga diperoleh dari IHK. Rata-rata harga komoditas terpilih dihitung dengan menggunakan rumus:

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}$$

Keterangan

P_i = Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah

V_i = Total *value* (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah

Q_i = Total Kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah

Langkah Kedua, menghitung paritas daya beli dengan menggunakan Metode Rao. Atau secara matematik dirumuskan sebagai:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Keterangan

PPP_j = Paritas Daya Beli (PPP) Kabupaten/Kota ke- j

p_{ij} = Harga komoditas i di Kabupaten/Kota j

p_{ik} = Harga komoditas i di Kabupaten/Kota k

m = Jumlah komoditas

- Menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{Paritas Daya Beli}}$$

Keterangan

Y_t^{**} = Rata-rata pengeluaran perkapita disesuaikan

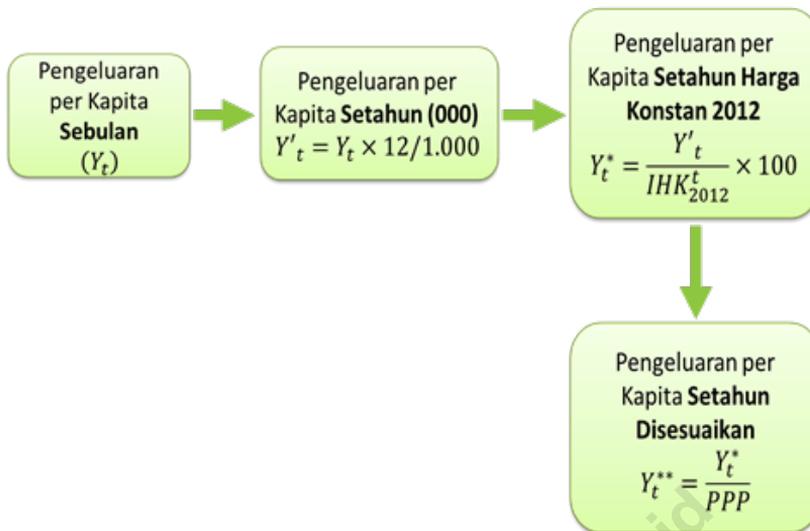
Y_t^* = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Indeks komposit pembentuk IPM meliputi:

a. Indeks Kesehatan Laki-Laki Dan Perempuan

Indeks Kesehatan dalam IPM dihitung dari Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya, indeks kesehatan menyatakan seberapa persen capaian indikator kesehatan terhadap nilai maksimumnya. Nilai maksimum yang digunakan dalam indeks kesehatan adalah 85 tahun, mengacu pada nilai maksimum yang direkomendasikan oleh UNDP. Angka ini merupakan AHH tertinggi Negara Jepang.

Sedangkan nilai minimum AHH adalah 20 tahun seperti yang direkomendasikan



Gambar 1.3 Alur Perhitungan Pengeluaran per Kapita Setahun Dिसesuaikan

MAKANAN		+	NON MAKANAN	
Beras	Pepaya		Rumah sendiri/bebas sewa	
Tepung terigu	Minyak kelapa		Rumah kontrak	
Ketela pohon/singkong	Minyak goreng lainnya		Rumah sewa	
Kentang	Kelapa		Rumah dinas	
Tongkol/tuna/cakalang	Gula pasir		Listrik	
Kembung	The		Air PAM	
Bandeng	Kopi		LPG	
Mujair	Garam		Minyak tanah	
Mas	Kecap		Lainnya (batu baterai, aki, korek, obat nyamuk, dll)	
Lele	Penyedap masakan/vetsin		Perlengkapan mandi	
Ikan segar lainnya	Mie instan		Barang kecantikan	
Daging sapi	Roti manis/roti lainnya		Perawatan kulit, muka, kuku/rambut	
Daging ayam ras	Kue kering		Sabun cuci	
Daging ayam kampung	Kue basah		Biaya RS Pemerintah	
Telur ayam ras	Makanan gorengan		Biaya RS Swasta	
Susu kental manis	Gado-gado/ketoprak		Puskesmas/pustu	
Susu bubuk	Nasi campur/rames		Praktek dokter/poliklinik	
Susu bubuk bayi	Nasi goreng		SPP	
Bayam	Nasi putih		Bensin	
Kangkung	Lontong/ketupat sayur		Transportasi/pengangkutan umum	
Kacang panjang	Soto/gule/sop/rawon/cincang		Pos dan Telekomunikasi	
Bawang merah	Sate/tongseng		Pakaian jadi laki-laki dewasa	
Bawang putih	Mie bakso/mie rebus/mie goreng		Pakaian jadi perempuan dewasa	
Cabe merah	Makanan ringan anak		Pakaian jadi anak-anak	
Cabe rawit	Ikan (goreng/bakar dll)		Alas kaki	
Tahu	Ayam/daging (goreng dll)		Minyak pelumas	
Tempe	Makanan jadi lainnya		Meubelair	
Jeruk	Air kemasan galon		Peralatan Rumah Tangga	
Mangga	Minuman jadi lainnya		Perlengkapan perabot rumah tangga	
Salak	Es lainnya		Alat-alat dapur/makan	
Pisang ambon	Rokok kretek filter			
Pisang raja	Rokok kretek tanpa filter			
Pisang lainnya	Rokok putih			

Gambar 1.4 Daftar Paket Komoditi Makanan dan Nonmakanan yang dipergunakan dalam Perhitungan PP untuk IPM Metode Baru

UNDP. Angka minimum 20 tahun ini juga merupakan AHH terendah. Berpedoman pada nilai minimum dan maksimum ini, indeks kesehatan dirumuskan sebagai:

$$I_{kesehatan} = \left(\frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}} \right) \times 100$$

Keterangan

- $I_{kesehatan}$ = Indeks Kesehatan
 AHH = Angka Harapan Hidup
 AHH_{\max} = Nilai Maksimal untuk Angka Harapan Hidup
 AHH_{\min} = Nilai Minimum untuk Angka Harapan Hidup

Dengan memasukkan angka minimum dan maksimum untuk AHH, maka rumus diatas dapat ditulis kembali menjadi:

$$I_{kesehatan} = \left(\frac{AHH - 20}{85 - 20} \right) \times 100 = \left(\frac{AHH - 20}{65} \right) \times 100$$

b. Indeks Pendidikan Laki-Laki Dan Perempuan

Dalam IPM metode baru, indeks pendidikan laki-laki dan perempuan diukur oleh dua indikator, yaitu RLS dan HLS baik laki-laki maupun perempuan. Harapan lama sekolah (HLS) merupakan pendorong (*booster*) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS). Sehingga intervensi pemerintah sebaiknya diarahkan pada peningkatan partisipasi sekolah yang dampaknya akan meningkatkan HLS dan pada akhirnya akan meningkatkan RLS.

Indeks rata-rata lama sekolah, merupakan persentase capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas yang terbagi dalam laki-laki dan perempuan, dibandingkan nilai maksimumnya. Nilai maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun, sesuai dengan yang digunakan oleh UNDP. Indeks rata-rata lama sekolah dirumuskan sebagai:

$$I_{RLS} = \left(\frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}} \right) \times 100$$

Keterangan

- I_{RLS} = Indeks Rata-rata Lama Sekolah
 RLS = Rata-rata lama sekolah
 RLS_{\max} = Nilai Maksimal untuk rata-rata lama sekolah
 RLS_{\min} = Nilai Minimum untuk rata-rata lama sekolah

dengan memasukkan nilai maksimum dan minimum yang direkomendasikan oleh UNDP, maka rumus diatas menjadi

$$I_{RLS} = \left(\frac{RLS - 0}{15 - 0} \right) \times 100 = \left(\frac{RLS}{15} \right) \times 100$$

Selanjutnya, untuk indeks harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan merupakan persentase capaian harapan lama sekolah terhadap nilai maksimum (18 tahun). Angka 18 tahun mengacu pada nilai maksimum yang digunakan oleh UNDP. Jika kita telusuri secara seksama, nilai maksimum ini merupakan penjumlahan lama sekolah dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Indeks HLS dirumuskan sebagai berikut

$$I_{HLS} = \left(\frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}} \right) \times 100$$

Keterangan

- I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah
- HLS = Harapan lama sekolah
- HLS_{\max} = Nilai Maksimal untuk harapan lama sekolah
- HLS_{\min} = Nilai Minimum untuk harapan lama sekolah

dengan memasukkan nilai maksimum dan minimum yang direkomendasikan oleh UNDP, maka rumus diatas menjadi

$$I_{HLS} = \left(\frac{HLS - 0}{18 - 0} \right) \times 100 = \left(\frac{HLS}{18} \right) \times 100$$

Selanjutnya dari indeks RLS dan indeks HLS tersebut diintegrasikan menjadi indeks pendidikan. Pada awalnya, tahun 2010 indeks pendidikan menggunakan rata-rata geometrik. Tetapi untuk penyempurnaan, pada tahun 2014 dirubah metodenya menggunakan rata-rata aritmatik, yang dirumuskan sebagai berikut

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$$

Keterangan

- $I_{Pendidikan}$ = Indeks Pendidikan
- I_{RLS} = Indeks Rata-rata Lama Sekolah
- I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah

c. Indeks Pengeluaran Laki-Laki Dan Perempuan

Dibandingkan indeks yang lainnya, batas minimum dan maksimum untuk indeks pengeluaran tidak mengikuti rekomendasi UNDP. Batas maksimum dan minimum indeks pendapatan menggunakan satuan rupiah, bukan dollar seperti

yang digunakan oleh UNDP. Selain itu, acuan nilai minimum dan maksimumnya juga menggunakan batas nilai minimum dan maksimum kabupaten/kota di Indonesia. Batas nilai minimum adalah merupakan garis kemiskinan Kabupaten Tolikara Provinsi Papua pada tahun 2010. Sedangkan batas maksimum pengeluaran per kapita disesuaikan adalah nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2015 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Indeks pengeluaran dirumuskan sebagai berikut:

$$I_{\text{pendapatan}} = \left(\frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})}{\ln(\text{pendapatan}_{\max}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})} \right) \times 100$$

Keterangan

- $I_{\text{pendapatan}}$ = Indeks Pendapatan
 Pendapatan = Pendapatan suatu daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
 Pendapatan_{min} = Batas minimum untuk pendapatan
 Pendapatan_{max} = Batas maksimum untuk pendapatan

Selanjutnya, dengan memasukkan batas minimum ($\ln(1.007,436)$) dan maksimum ($\ln(26.572,352)$) pada rumus diatas, diperoleh rumus sebagai berikut

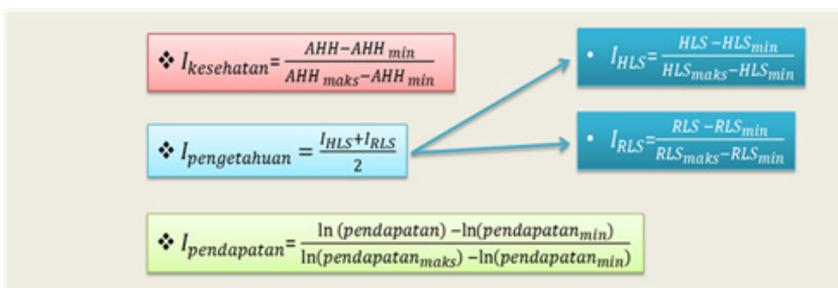
$$I_{\text{pendapatan}} = \left(\frac{\ln(\text{pendapatan}) - 6,92}{10,19 - 6,92} \right) \times 100$$

Penghitungan IPM Metode Baru

Berdasarkan berbagai uraian dan rumus yang telah dijabarkan diatas, maka IPM metode baru dirumuskan sebagai

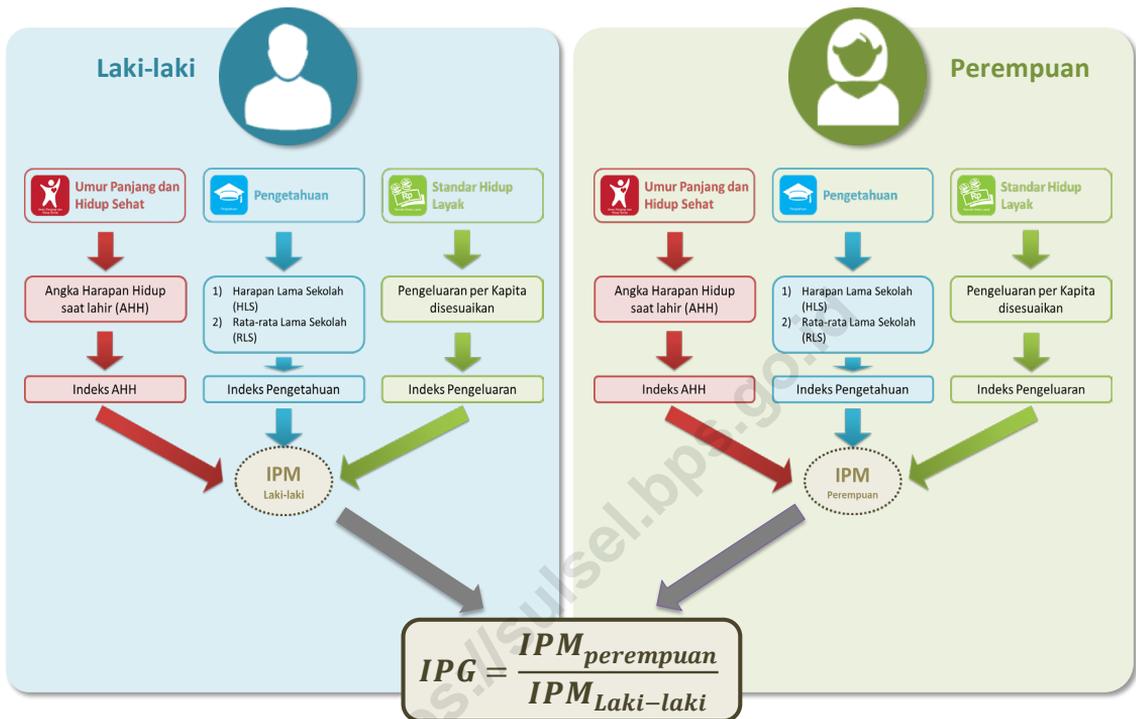
$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Secara ringkas, proses penghitungan indeks untuk IPM metode baru dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 1.5 Rumus Perhitungan Indeks IPM Metode Baru

Seperti telah disebutkan sebelumnya, dalam pengukuran IPG, semua variabel pembentuk IPM yang telah disebutkan di hitung dalam laki-laki dan perempuan. Pengukuran IPM yang dipilah antara laki-laki dan perempuan, menghasilkan rasio yang disebut IPG.



Gambar 1.6 Gambaran Perhitungan IPM

BAB II

GENDER DALAM RANAH MASYARAKAT

<https://smpn1bpps.go.id>

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB II

GENDER DALAM RANAH MASYARAKAT

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki wilayah dengan luas 46.717,48 km² dengan persentase terhadap keseluruhan luas wilayah Indonesia adalah sebesar 2,44 persen. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menaungi 24 daerah tingkat II dengan 21 wilayah berstatus kabupaten dan 3 wilayah kota (Kota Makassar, Kota Palopo dan Kota Parepare). Kabupaten terakhir yang terbentuk adalah Kabupaten Toraja Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang relatif lebih maju dibanding dengan provinsi lainnya di Kawasan Timur Indonesia sehingga terkenal dengan sebutan Pintu Gerbang Indonesia Timur. Sejak tahun 1960, pemerintah telah memprioritaskan sektor pertanian sebagai sektor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dalam periode 1960 hingga sekarang sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian, predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi Selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial, namun tidak dipungkiri



Gambar 2.1 Peta Sulawesi Selatan

kecenderungan besarnya sumbangan sektor pertanian semakin menurun setiap tahunnya. Sektor lainnya yang juga menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa.

2.1. Kependudukan

Penduduk dikonotasikan sebagai orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, kampung, wilayah atau negeri, dan merupakan aset pembangunan atau sering disebut sumber daya manusia.

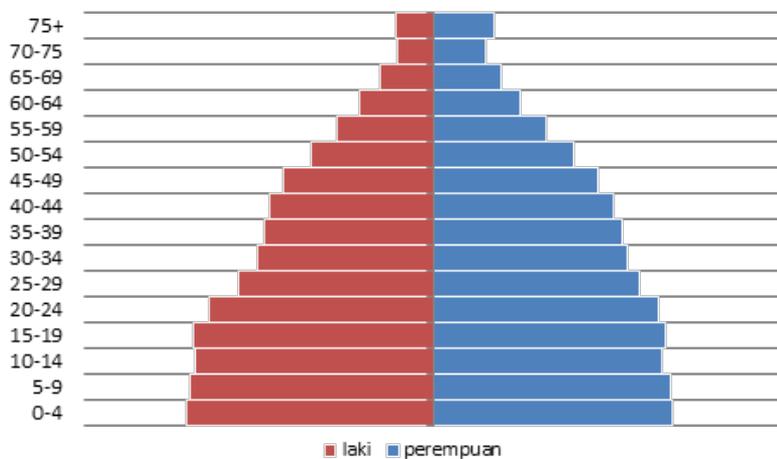
Jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2017 berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk telah menembus angka 8,69 juta jiwa.



Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan, 2010-2017 (jiwa)

Terjadinya pertumbuhan penduduk diantaranya adalah karena adanya kelahiran, kematian dan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang relatif besar terjadi di daerah perkotaan beserta kabupaten disekitarnya. Hal ini adalah wajar, karena kegiatan ekonomi masyarakat berpusat di daerah perkotaan. Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, kabupaten/kota yang memiliki penambahan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Makassar yaitu bertambah sekitar 60 ribu jiwa. Selain Kota Makassar, penambahan penduduk yang juga relatif besar terjadi di Kabupaten Gowa (sekitar 39 ribu jiwa) yang merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Kabupaten Soppeng merupakan kabupaten dengan penambahan penduduk yang paling lambat dibandingkan kabupaten/kota lain.

Dari komposisi penduduk, dengan *sex ratio* sebesar 95,54, menunjukkan bahwa di tahun 2017, jumlah penduduk perempuan masih lebih besar dibanding dengan penduduk laki-laki. Komposisi ini hampir terjadi pada semua kelompok umur, kecuali kelompok usia 0 hingga 24 tahun, pada kelompok ini, laki-laki masih mendominasi jumlah penduduk dengan *sex ratio* sebesar 103,66 .



Gambar 2.3 Piramida Penduduk Tahun 2017

Dominasi jumlah penduduk perempuan terhadap laki-laki juga hampir merata di wilayah Sulsel. Hanya 5 kabupaten/kota yang memiliki sex ratio diatas 100, yaitu Enrekang, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Toraja Utara, dan yang tertinggi adalah Luwu Timur.

Besarnya jumlah penduduk perempuan merupakan potensi, mengingat peran penting perempuan dalam berbagai lini utamanya sebagai pencetak generasi-generasi penerus. Perlu perhatian serius khususnya terhadap kesehatan ibu. Tak kalah penting peran perempuan dalam sisi produktivitas, yaitu penyumbang angkatan kerja. Dari komposisi penduduk, usia produktif penduduk yaitu pada kelompok usia 15-64 tahun di dominasi oleh kaum perempuan. Komposisi

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2017 (dalam Jiwa)

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan
01. Selayar	63.968	69.035	13. Wajo	189.379	206.204
02. Bulukumba	196.426	219.287	14. Sidrap	145.003	151.122
03. Bantaeng	89.494	96.087	15. Pinrang	180.586	191.644
04. Jeneponto	173.771	186.016	16. Enrekang	102.117	101.203
05. Takalar	140.870	152.113	17. Luwu	174.829	181.476
06. Gowa	368.234	379.966	18. Tator	117.030	114.489
07. Sinjai	116.766	124.442	19. Luwu Utara	154.594	153.407
08. Maros	169.433	176.950	20. Luwu Timur	147.984	139.890
09. Pangkep	159.611	170.180	21. Toraja Utara	114.509	113.905
10. Barru	83.082	89.685	22. Makassar	737.146	751.865
11. Bone	358.889	392.137	23. Parepare	69.822	72.275
12. Soppeng	106.591	119.875	24. Palopo	85.967	90.940

penduduk perempuan yang besar merupakan aset dan potensi wilayah, namun sebaliknya, jika perempuan tidak mampu berkarya secara produktif, baik untuk pribadi, keluarga maupun ranah masyarakat, maka justru akan menjadi beban bagi wilayah.

2.2. Bidang Kesehatan

Menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia tahun 1992, kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hidup sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan setiap insan mempunyai hak untuk menikmati derajat kesehatan yang tinggi bagi kehidupannya. Agar dapat dicapai derajat kesehatan yang tinggi, penduduk juga harus mendapatkan hak-haknya atas kecukupan dalam memperoleh pangan (makanan, dan air minum), sandang berupa pakaian, papan dalam bentuk perumahan/pemukiman yang layak dan siap huni, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan selain angka kesakitan, dan angka kematian bayi yang dijadikan tolak ukur dari kinerja pemerintah dalam upaya melaksanakan pembangunan kesehatan.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Disamping itu, setiap individu juga bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Kemajuan dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan nasional dan sebaliknya pembangunan nasional akan mempunyai dampak penting terhadap derajat kesehatan penduduk.

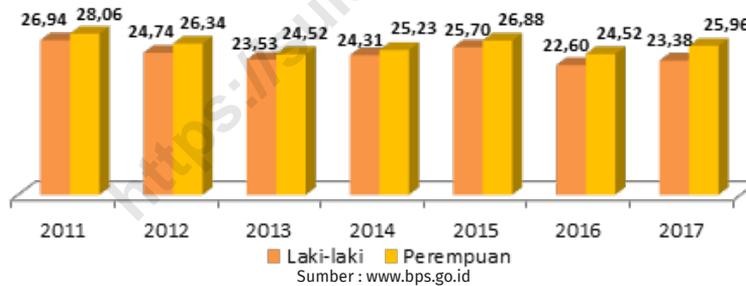
Pada hakekatnya derajat kesehatan penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor perilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi perlu dijalankan antar intersektoral dengan menyertakan peran serta masyarakat dan swasta.

Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan dapat dilihat dari derajat kesehatan dan gizi penduduk, meningkatnya pelayanan kesehatan, dan bertambah baiknya lingkungan kesehatan masyarakat.

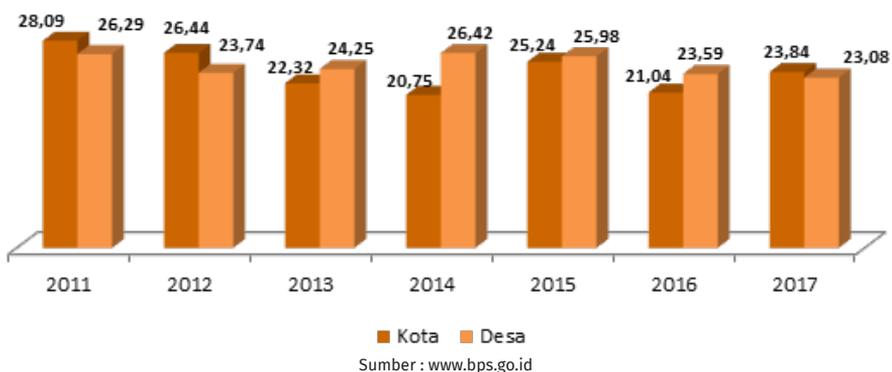
a) Kualitas Kesehatan Masyarakat

Faktor biologis dan gaya hidup mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Daya tahan perempuan lebih baik dibanding laki-laki. Dari sejak masa di dalam kandungan hingga lahir, laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah lain di dalam kandungan. Dari segi kromosom, sejak lahir wanita dibekali sepasang kromosom X yang mengandung sekitar 1100 gen. Selain berperan penting dalam pengaturan hormon, kromosom X juga berperan dalam fungsi vital tubuh lainnya, sementara pada laki-laki yang memiliki kromosom Y hanya mengandung sekitar 100 gen.

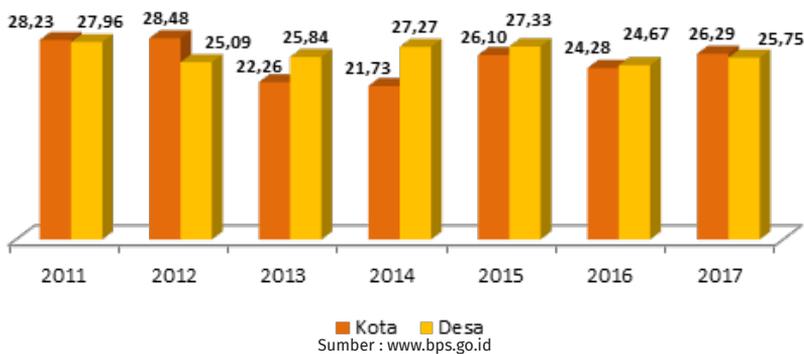
Dilihat dari gaya hidup, kebiasaan hidup sehat seperti tidak merokok lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Disamping rokok, secara umum banyak laki-laki yang bekerja dan beraktivitas diluar dibandingkan dengan perempuan. Padatnya aktivitas diluar ruangan juga mendatangkan berbagai macam risiko kesehatan dan keselamatan. Meski perempuan memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dari laki-laki, namun secara umum perempuan lebih sensitif terhadap rasa sakit. Kondisi ini terlihat dari data keluhan kesehatan. Dalam kurun waktu 2011 hingga 2017, persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan lebih banyak dibanding laki-laki.



Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2017 (%)



Gambar 2.5 Persentase Penduduk Laki-laki yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kota dan Desa Tahun 2011-2017 (%)



Gambar 2.6 Persentase Penduduk Perempuan yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kota dan Desa Tahun 2011-2017 (%)

Dari segi kewilayahan, semakin maju suatu wilayah, seharusnya berafiliasi pula dengan tingkat kesehatan masyarakatnya. Data persentase keluhan kesehatan penduduk tidaklah sama setiap tahunnya. Dalam dua tahun terakhir, data Susenas mencatat pada tahun 2016, penduduk di wilayah pedesaan lebih banyak mempunyai keluhan kesehatan dibanding penduduk di wilayah perkotaan. Namun di tahun 2017, justru penduduk perkotaan lebih banyak mempunyai keluhan kesehatan dibanding penduduk desa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Perbedaan gaya hidup dan pola pikir masyarakat kota dan desa cukup mempengaruhi alasan banyaknya keluhan kesehatan baik di perkotaan maupun di pedesaan.

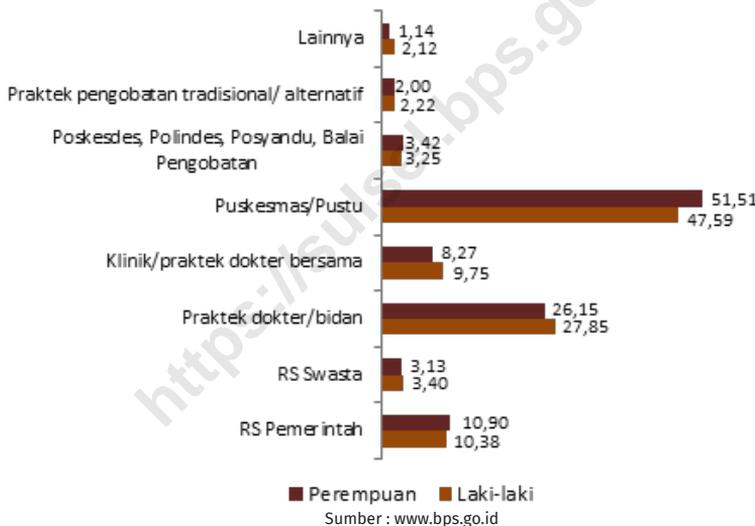
Meskipun sering mengeluh tentang rasa sakit, kenyataannya, penduduk yang benar-benar menderita sakit lebih di dominasi oleh laki-laki. Di tahun 2017, dari 52,93 persen total penduduk yang menderita sakit, persentase penduduk laki-laki yang menderita sakit, sekitar 52 persen, sementara perempuan yang benar-benar menderita sakit selama sebulan terakhir sekitar 48 persen.

b) Akses Kesehatan Masyarakat

Ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dalam pelayanan kesehatan penduduk menjadi suatu keharusan.

Selain jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia, derajat kesehatan penduduk tercermin dari persentase penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan. Pemerintah harus meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau. Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas kesehatan

sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam akses fasilitas kesehatan adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, serta jenis pelayanan kesehatan. Dari beberapa alternatif fasilitas kesehatan, ternyata puskesmas/pustu lebih diminati oleh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Ketersediaan, kemudahan akses serta biaya menjadi pendorong tingginya minat masyarakat untuk berobat di puskesmas/pustu. Dari segi gender, di tahun 2017, sekitar 52 persen perempuan pergi berobat di puskesmas/pustu selama sebulan terakhir, sementara laki-laki sekitar 48 persen. Jenis fasilitas kesehatan yang dipilih laki-laki cenderung lebih modern. Tampak dari Gambar 3.3, laki-laki cenderung lebih berminat untuk berobat di rumah sakit swasta, praktek dokter, atau klinik/praktek dokter bersama dibanding perempuan.



Gambar 2.7 Persentase Penduduk yang berobat Jalan Sebulan Terakhir, Tahun 2017 (%)

Gaya hidup sehat tak lepas dari kebiasaan merokok. Budaya merokok menjadi kebiasaan yang mulai tak pandang usia dan jenis kelamin. Pada 2017 tercatat penduduk di atas 5 tahun yang merokok selama sebulan terakhir sekitar 20 persen. Persentase perokok laki-laki sekitar 41 persen, sementara perokok perempuan hanya sekitar 0,48 persen dari penduduk perempuan. Kondisi dominannya perokok laki-laki, turut menyumbang pendeknya angka harapan hidup laki-laki di banding perempuan.

Jumlah rokok yang dihisap juga menjadi perhatian, perokok laki-laki rata-rata menghisap sekitar 97 batang perminggu, yang jika di rata-rata perhari, sekitar 14 batang perhari. Sementara perokok perempuan bisa menghabiskan sekitar 12 batang perhari.

2.3. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar penduduk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan. Tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan yang tinggi merupakan unsur penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi diharapkan akan berimplikasi kepada produktivitas yang tinggi pula sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender. Semakin bagus kualitas pendidikan, maka semakin berkurang kesenjangan gender. Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan pendidikan melalui berbagai program, antara lain dengan meningkatkan pengadaan sarana/prasarana pendidikan, program wajib belajar, beasiswa dan pemberian bantuan operasional sekolah serta beberapa program lainnya. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas.

a) Angka Partisipasi

Ada beberapa ukuran untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu, diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.

Secara umum tahun 2017, APS SD sebesar 99,16 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7-12 tahun di Sulsel sedang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar. Secara gender, partisipasi laki-laki usia SD lebih banyak dibanding perempuan, sementara pada usia setingkat SLTP dan SLTA, perempuan lebih unggul. Artinya, secara data, kesadaran akan menuntut ilmu pada jenjang sekolah lanjutan sudah cukup baik dan merata antara laki-laki dan perempuan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu

Tabel 2.2 Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 (%)

Jenis Kelamin	7-12 Tahun	13-15	16-18
Laki-laki	98,78	90,70	67,56
Perempuan	99,55	95,58	73,83
Total	99,16	93,09	70,60

Sumber : Statistik Pendidikan Sulawesi Selatan 2017

jenjang tertentu, berapapun umurnya, terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 persen karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah.

Untuk melihat sejauh mana anak usia sekolah yang terserap diberbagai pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan atas, digunakan indikator angka partisipasi kasar dan angka putus sekolah. Untuk jenjang sekolah dasar, pada tahun 2017, anak yang bersekolah di jenjang pendidikan dasar menjadi 109,63 persen. Artinya jumlah murid yang bersekolah di tingkat SD jauh lebih banyak dari penduduk usia 7-12 tahun, sekitar 9,63 persen usianya diluar rentang usia tersebut.

APK untuk tingkat SD dan SLTA pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sebaliknya APK untuk tingkat SLTP mengalami kenaikan.

Secara gender, pada jenjang SD, APK laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, sementara untuk tingkat SLTP dan SLTA, perempuan lebih dominan.

Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Secara total, di tahun 2017, APM Sulsel di seluruh jenjang mengalami peningkatan. Secara gender, APM Sulsel perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, pada seluruh jenjang pendidikan. Melihat komposisi penduduk, penduduk perempuan yang memang lebih tinggi dibanding laki-laki pada usia tersebut. Artinya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi menjadi penghalang untuk melaksanakan pendidikan. Kesempatan sekolah sudah terbuka lebar bagi siapapun.

Tabel 2.3 Angka Partisipasi Kasar Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 (%)

Jenis Kelamin	APK SD	APK SLTP	APK SLTA
Laki-laki	109,78	82,73	80,73
Perempuan	109,47	85,26	85,69
Total	109,63	83,97	83,14

Sumber : Statistik Pendidikan Sulawesi Selatan 2017

Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 (%)

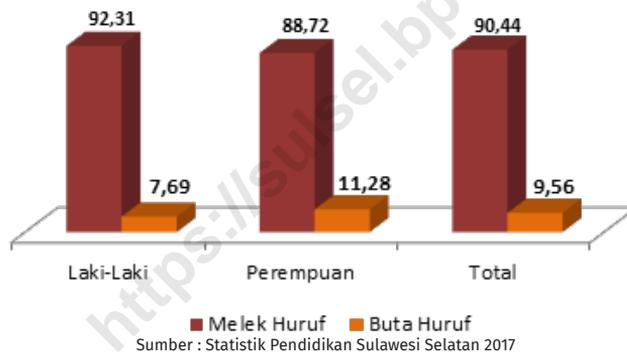
Jenis Kelamin	APM SD	APM SLTP	APM SLTA
Laki-laki	97,45	72,88	56,92
Perempuan	97,54	75,90	62,98
Total	97,49	74,36	59,86

Sumber : Statistik Pendidikan Sulawesi Selatan 2017

b) Melek Huruf

Indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan suatu penduduk dalam kemampuan dasarnya terhadap pengetahuan adalah Angka Melek Huruf (AMH). Semakin tinggi AMH suatu wilayah, semakin terbuka akses pengetahuan penduduk wilayah tersebut. Tahun 2017, lebih dari 90 persen penduduk Sulsel yang berusia 15 tahun ke atas telah memiliki kemampuan baca dan tulis. Selain program wajib belajar 12 tahun, berbagai usaha lain seperti kejar program paket A, paket B dan program keaksaraan Nasional nyata mendongkrak kemampuan baca tulis penduduk.

Membaca data tidak hanya secara umum, perlu pula melihat pola persebarannya juga, agar perbaikan dapat dilakukan secara merata ke seluruh wilayah Sulsel. Dari 24 kabupaten/kota, Makassar menjadi kota dengan angka melek huruf tertinggi (98,29), sementara Jeneponto menjadi kabupaten dengan angka melek huruf terendah (82,38). Masih ada 9 kabupaten/kota yang memiliki angka melek huruf di bawah rata-rata Sulsel.



Gambar 2.8 Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

Jika melihat secara gender, kemampuan baca tulis laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan. Kondisi ini telah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya. Ketidaksetaraan ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah dan masyarakat.

Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, dari gambar 2.7 dapat pula dimaknai bahwa pemerintah masih punya tanggungan untuk mengatasi sekitar 10 persen penduduk Sulsel yang buta huruf. Kondisi buta huruf ini berhubungan dengan banyaknya penduduk yang tidak ataupun belum pernah sekolah.

Data tahun 2017 menunjukkan secara total, ada sebesar 8,86 persen penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah. Terdapat perbedaan yang cukup berjarak secara gender, jumlah penduduk perempuan yang tidak atau belum

pernah bersekolah sebesar 9,72 persen, sementara laki-laki sebesar 7,96 persen. Penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah, tentu secara kemampuan pengetahuan dan pendidikan tidaklah memadai. Bahkan akan mempengaruhi jumlah penduduk yang buta huruf.



Gambar 2.9 Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

Optimalisasi program-program yang telah dicanangkan serta mencari terobosan-terobosan baru perlu dilakukan guna pemberantasan buta huruf, peningkatan angka melek huruf, serta kualitas pendidikan, juga mencapai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke empat yaitu perwujudan pendidikan berkualitas.

2.4 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Akhir-akhir ini topik mengenai masalah kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional maupun regional mendapat perhatian banyak orang.

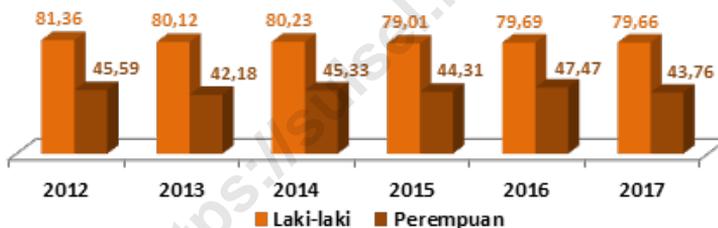
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan penambahan investasi dan kebijakan ekonomi yang kondusif. Dengan penambahan investasi baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan penyerapan tenaga kerja serta elastisitasnya. Sumber data yang dipergunakan berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sebenarnya data angkatan kerja juga dihasilkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), namun karena data Sakernas lebih spesifik sehingga dalam bahasan ini akan digunakan data Sakernas.

a) Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka ini perlu dicermati, karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Dalam ranah gender, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja. Paradigma laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga, masih diyakini sebagian besar masyarakat. Secara total, pada periode Agustus 2017, persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja berada di pusran 60,98 persen. Secara gender, TPAK mencatat hanya sekitar 44 persen perempuan yang siap dalam dunia kerja. Sementara laki-laki sudah mencapai sekitar 80 persen. Ternyata dunia kerja masih di dominasi laki-laki.



Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan 2 2018

Gambar 2.10 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2017 (Periode Agustus) (%)

b) Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meliputi semua penduduk yang masuk dalam angkatan kerja namun tidak punya pekerjaan, mempersiapkan usaha, ataupun mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Berkebalikan dengan partisipasi angkatan kerja, TPT perempuan cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup jauh perbedaannya, dimana laki-laki jauh lebih banyak dibanding perempuan, namun persentase pengangguran justru lebih dominan perempuan, menunjukkan kesempatan dan peluang kerja bagi perempuan masih belum terbuka lebar.

c) Kondisi Pekerjaan

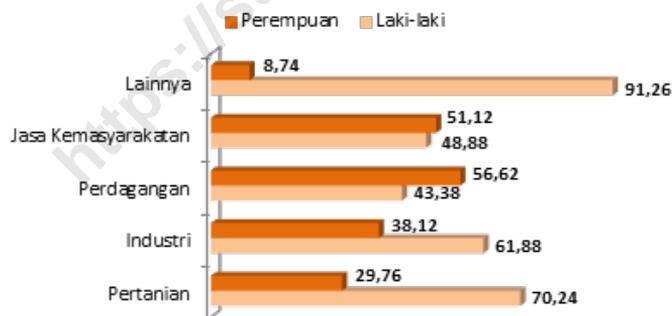
Mereka yang terserap di berbagai lapangan pekerjaan pada periode Agustus 2017 secara total masih dominan pada sektor pertanian, meski demikian



Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan 2 2018

Gambar 2.11 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2017 (Periode Agustus) (%)

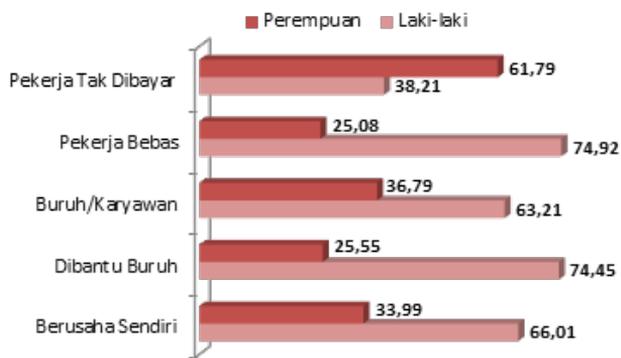
penyerapan pada sektor ini semakin menurun setiap tahunnya. Pekerja pada sektor ini pun lebih di dominasi oleh laki-laki. Dari 100 orang pekerja di sektor pertanian, sekitar 70 orang adalah laki-laki, sementara perempuan sekitar 30 orang. Dominasi serapan tenaga kerja perempuan dibanding laki-laki ada pada sektor perdagangan, rumah makan, hotel, jasa kemasyarakatan, dan sosial, serta perorangan.



Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan 2 2018

Gambar 2.12 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2017 (Periode Agustus) (%)

Jika melihat status pekerjaan, ternyata perempuan lebih dominan sebagai pekerja dengan status tidak dibayar. Persentasenya cukup menonjol, dari sekitar 100 orang pekerja tak dibayar, 62 orang adalah perempuan. Sementara status pekerjaan lain yang bisa dikatakan menghasilkan pendapatan (status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh, karyawan, dan pekerja bebas), persentase laki-laki jauh mendominasi. Besarnya persentase pekerja perempuan tak dibayar cenderung dikarenakan peran perempuan yang melakukan pekerjaan tersebut sebagai sampingan dan bukan pekerjaan utama, dimana pekerjaan utama adalah mengurus rumah tangga.



Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan 2 2018

Gambar 2.13 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2017 (Periode Agustus) (%)

Dari jenis pekerjaan yang dilakukan, jenis tenaga kepemimpinan, ketatalaksanaan dan tenaga usaha jasa merupakan dua jenis pekerjaan yang didominasi perempuan. Sementara tenaga profesional, tata usaha, jasa penjualan, usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, serta tenaga produksi, operator alat dan pekerja kasar, masih didominasi laki-laki.

Durasi kerja antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Secara umum, jumlah jam kerja penduduk lebih dari 35 jam seminggu. Jika dilihat secara gender, persentase laki-laki yang bekerja di atas 35 jam seminggu lebih tinggi dibanding perempuan.

Tabel 2.5 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun 2017 (Periode Agustus)

Penduduk Bekerja	Laki-Laki	Perempuan
Jenis Pekerjaan		
Tenaga Profesional	58,15	41,85
Tenaga Kepemimpinan	35,09	64,91
Tenaga Tata Usaha dan Yang Sejenis	59,63	40,37
Tenaga Tata Usaha Jasa Penjualan	52,53	47,47
Tenaga Usaha Jasa	41,65	58,35
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	70,71	29,29
Tenaga Produksi, Operator, Alat-alat, dan Pekerja Kasar	76,18	23,82
Jam Kerja Seminggu		
0 Jam	60,03	39,97
1 – 14 Jam	47,43	52,57
15 – 34 Jam	55,73	44,27
Lebih dari 35 Jam	69,01	30,99

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan Agustus 2017

BAB III

CAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER SULAWESI SELATAN

<http://www.kemppos.go.id>

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB III**CAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER
SULAWESI SELATAN****3.1. Status Pembangunan Gender di Sulawesi Selatan**

Istilah gender terkait dengan paradigma antara perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Di sebagian negara-negara yang di dominasi dengan budaya patriarki, perbedaan sering menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan, serta kehidupan bermasyarakat. Untuk menghilangkan diskriminasi gender, diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai kebijakan diambil untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diantaranya ditetapkan melalui GBHN 1999, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas 2000-2004, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Diharapkan dengan upaya pemerintah yang didukung kesadaran dan partisipasi masyarakat, keadilan dan kesetaraan gender dapat tercapai.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sulawesi Selatan tahun 2017 tercatat 92,84, lebih baik dibanding IPG Sulsel tahun 2016 yang tercatat 92,79. Penjabarannya, IPM laki-laki sebesar 74,21 dan perempuan sebesar 68,90. Masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sejak tahun 2011 indeks pembangunan laki-laki di Sulsel sudah berstatus 'tinggi' (nilai IPM diatas 70), sementara perempuan masih berstatus di selang 64 hingga 69 poin dan berstatus 'sedang'. Hal inilah yang menyebabkan IPG Sulsel masih berada di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2010 hingga sekarang.

Meskipun capaian pembangunan perempuan masih belum mampu menyamai laki-laki, namun secara trend, perkembangan pembangunan perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2017, rata-rata pertumbuhan IPM laki-laki sekitar 0,85 persen, sementara perempuan 1,05 persen. IPG Sulsel sempat mengalami penurunan pada tahun 2016, penyebabnya adalah pertumbuhan IPM perempuan kalah cepat dibanding pertumbuhan IPM laki-laki.

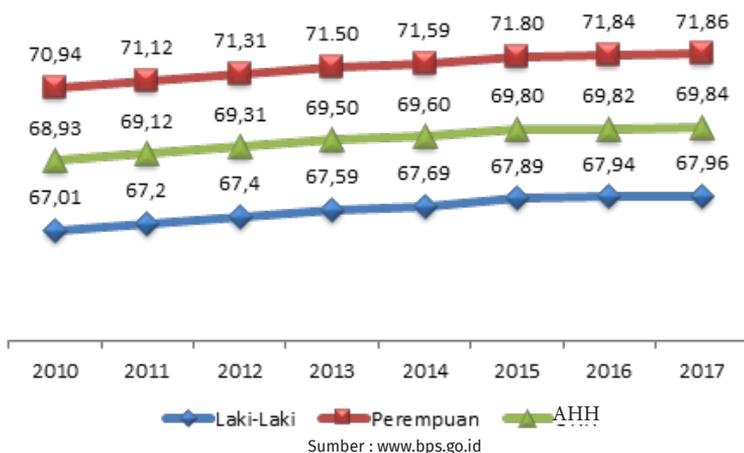
Pada tahun 2017, pembangunan gender di Sulsel kembali mengalami peningkatan sekitar 0,05 persen dibanding tahun 2016. Peningkatan ini terjadi karena pertumbuhan IPM perempuan yang kembali lebih besar dibanding pertumbuhan IPM laki-laki pada periode tahun 2016-2017. IPM perempuan tumbuh 0,88 persen sementara IPM laki-laki tumbuh 0,82 persen. Perlu usaha lebih

pemerintah untuk menggenjot peningkatan IPG Sulsel, karena pertumbuhan IPG Sulsel Tahun 2017 masih lebih rendah dibanding pertumbuhan nasional. Secara rata-rata, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan IPG Sulsel juga masih di bawah rata-rata pertumbuhan IPG nasional.



Gambar 3.1 Perkembangan IPG, IPM Laki-Laki, dan IPM Perempuan di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017

IPG merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. Dimensi kesehatan diwakili oleh angka harapan hidup (AHH) saat lahir. Pada dimensi ini, perempuan ternyata lebih unggul dibanding laki-laki. Secara genetik, perempuan mempunyai daya tahan kesehatan yang lebih baik dibanding laki-laki. Beberapa studi ilmiah telah membuktikannya, mulai dari segi kromosom, hormonal hingga gaya hidup, perempuan cenderung lebih unggul. Hal inilah yang menyebabkan secara umum angka harapan hidup perempuan lebih tinggi di banding laki-laki. Pada tahun 2017 AHH perempuan



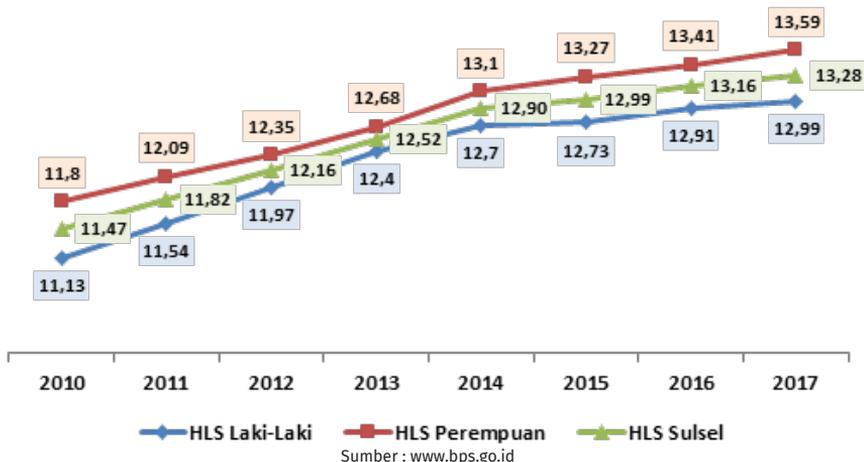
Gambar 3.2 Perkembangan AHH Laki-laki, AHH Perempuan dan Total AHH di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017 (Tahun)

di Sulsel telah mencapai 71,86 tahun, sementara laki-laki mencapai 67,96 tahun. Meski AHH laki-laki lebih rendah dibanding perempuan, percepatan AHH laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dalam kurun waktu 2010-2017, rata-rata pertumbuhan AHH laki-laki pertahun sekitar 0,20 persen sementara perempuan 0,18 persen pertahun. Secara akumulasi AHH di Sulsel tahun 2017 mencapai usia 69,84 tahun. Peningkatan AHH yang terjadi setiap tahunnya mengindikasikan kondisi kesehatan masyarakat Sulsel yang cenderung meningkat.

Berikutnya adalah dimensi pendidikan. Manusia membutuhkan asupan bagi akal pikirannya sebagai bekal kehidupannya. Pendidikan adalah senjata paling ampuh mengubah dunia (Nelson Mandela). Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang, semakin tinggi pula kualitas pembangunan yang dicapai. Negara menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negaranya, yang termaktub dalam UUD 1945. Implementasinya tampak pada program nawacita serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Kualitas pembangunan manusia dalam dimensi pendidikan diwakili oleh harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

HLS mengukur peluang sekolah anak di masa mendatang. Indikator ini diukur pada penduduk diatas usia 7 tahun. HLS juga merupakan pendorong (booster) untuk meningkatkan RLS. Secara agregat, HLS Sulsel terus bertumbuh setiap tahunnya. Hingga tahun 2017, HLS Sulsel telah mencapai 13,28 tahun, yang artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga ke jenjang diploma.

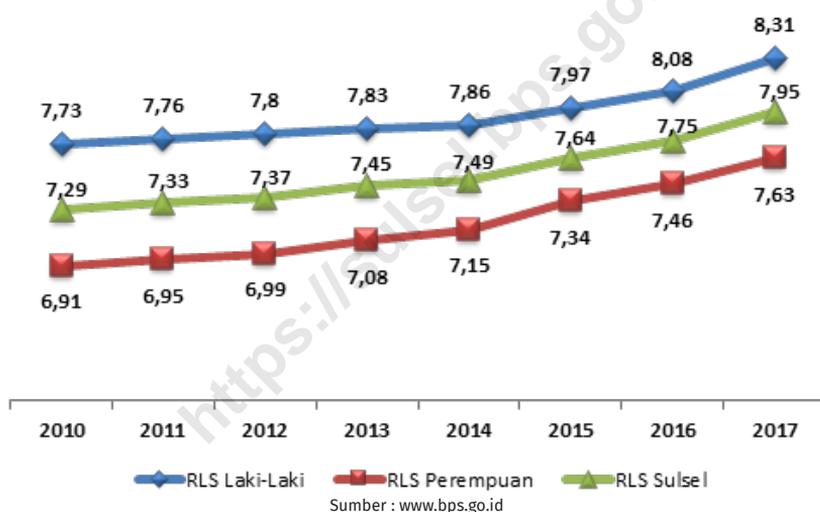
Seperti angka harapan hidup, peluang bersekolah anak perempuan sedikit lebih baik dibanding laki-laki. Di tahun 2017, HLS perempuan tercatat 13,59 tahun, sementara laki-laki hampir 12,99 tahun. Rendahnya peluang bersekolah laki-laki



Gambar 3.3 Perkembangan HLS Laki-laki, HLS Perempuan dan Total HLS di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017 (Tahun)

dibanding perempuan terkait fenomena diantaranya jumlah tenaga kerja anak laki-laki yang lebih tinggi dibanding perempuan. Kondisi ekonomi memaksa pekerja anak untuk bekerja, yang berimbas pada putusnya sekolah.

Realita ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah tercatat dalam angka RLS. Berbeda dengan HLS, di tahun 2017, secara rata-rata laki-laki di Sulsel sudah mampu mengenyam pendidikan hingga 8,31 tahun atau sekitar kelas 2-3 SMP, sementara perempuan masih sekitar 7,63 tahun. Meski demikian, secara rata-rata, dalam kurun 2010 hingga 2017 trend pertumbuhan RLS perempuan ternyata lebih cepat dibanding laki-laki. Dengan rata-rata pertumbuhan RLS perempuan sekitar 1,43 persen, sementara laki-laki tumbuh sekitar 1,04 persen. Fenomena ini terkait dengan fakta data partisipasi sekolah, di tahun 2016 dan 2017, angka partisipasi sekolah murni (APM) perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, baik jenjang SD, SMP ataupun SMA.

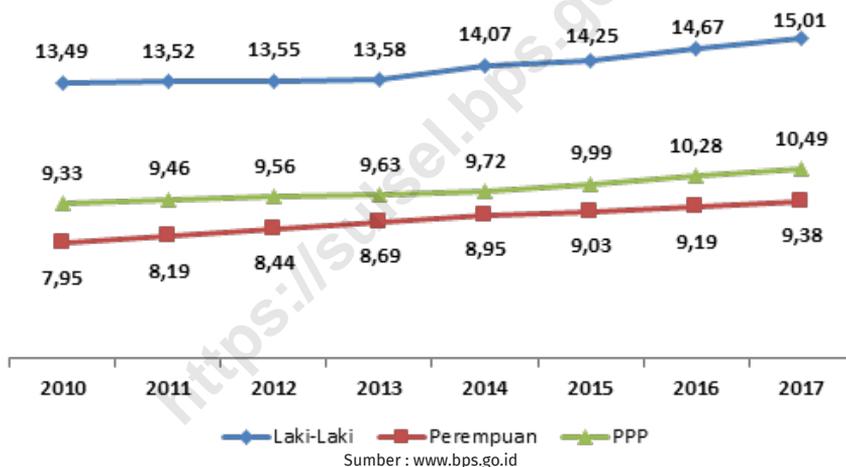


Gambar 3.4 Perkembangan RLS Laki-laki, RLS Perempuan dan Total RLS di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017 (Tahun)

Ukuran capaian pembangunan manusia dari sisi ekonomi dilihat dari dimensi standar hidup layak, yang menjadi dimensi berikutnya dalam konteks penghitungan indikator IPG. Standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (PPP). Tren PPP Sulsel secara agregasi terus bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan di angka 1,69 persen. Tahun 2017, PPP Sulsel telah mencapai nilai 10,49 juta rupiah. Secara gender, dari tahun 2010 hingga 2017, PPP laki-laki jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Meski secara rata-rata pertumbuhan PPP perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, namun senjang PPP laki-laki dan perempuan di Sulsel masih cukup tinggi. Tercatat di tahun 2017 PPP laki-laki sebesar 15,01 juta rupiah sementara perempuan sebesar 9,38 juta rupiah. Kondisi ini terkait fakta bahwa jumlah tenaga kerja perempuan

yang memang lebih sedikit di banding laki-laki. Salah satu ukurannya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja.

Hingga Tahun 2017 TPAK Sulsel masih di dominasi oleh laki-laki dengan kisaran 70 hingga 80 persen, sementara perempuan masih dalam kisaran 40 persen. Pengeluaran terkait dengan pendapatan, dan pendapatan terkait usaha atau kerja. Dengan melihat kondisi ketenagakerjaan laki-laki dan perempuan, wajar apabila PPP perempuan menjadi lebih rendah dibanding laki-laki. Kesenjangan ekonomi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan faktanya sudah berlangsung lama. Aspek kultural, terjadinya diskriminasi dalam lapangan pekerjaan dan kurangnya pendidikan berperan dalam kesenjangan laki-laki dan perempuan. Usaha dan kebijakan seluruh pihak mutlak diperlukan untuk menggerus diskriminasi yang masih berlangsung secara masif.



Gambar 3.5 Perkembangan PPP Laki-laki, PPP Perempuan dan Total PPP di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017 (Juta Rupiah)

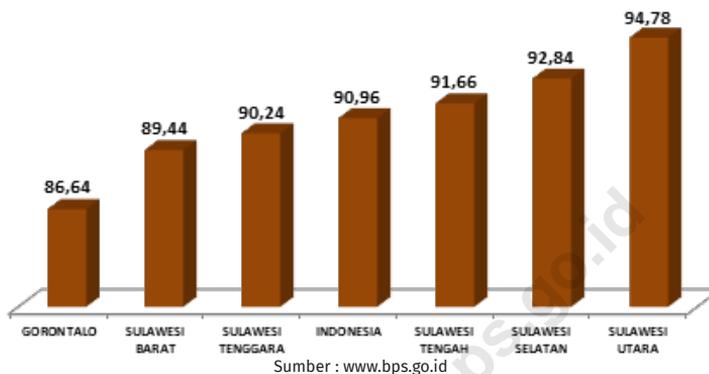
3.2. Posisi IPG Sulawesi Selatan di Indonesia

Pemerataan pembangunan menjadi salah satu agenda penting baik dalam program nawacita maupun tujuan pembangunan berkelanjutan. Melihat keterbandingan antar wilayah dapat menjadi evaluasi sejauh mana disparitas telah diminimalisir. Disamping itu, keterbandingan antar wilayah di Indonesia juga berperan penting dalam mengukur keberhasilan di wilayah masing-masing. Semakin rendah IPG suatu wilayah, semakin besar pula ketimpangan yang terjadi antara pembangunan manusia perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 2017, Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan IPG tertinggi di Indonesia dengan angka IPG sebesar 94,78, sementara IPG terendah diduduki oleh Papua dengan angka 79,38. Capaian IPG Sulawesi Selatan cukup baik dengan

nilai 92,84 dan berada di posisi ke 7 secara nasional setelah Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Barat, Bali, dan Kepulauan Riau. Sejak tahun 2010 hingga 2017, angka IPG Sulsel selalu berada di atas angka nasional.

Dalam lingkup pulau Sulawesi, IPG Sulsel berada pada urutan ke- 2 setelah Sulawesi Utara. Posisi ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2010, saat dimulainya penghitungan IPG.



Gambar 3.6 Grafik IPG Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2017

Tingginya usia penduduk perempuan terhadap laki-laki, merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam lingkup pulau Sulawesi, AHH perempuan Sulsel ada di posisi ketiga setelah Sulut dan Sultra. Sementara dimensi pendidikan, HLS perempuan Sulsel menempati posisi pertama di Sulawesi. Sedikitnya kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan di Sulut, menempatkan Sulut berada pada posisi pertama angka RLS nya, baik RLS laki-laki maupun perempuan. Tahun yang dilalui RLS Sulut pun paling tinggi dibanding 5 provinsi lain di pulau Sulawesi. Sementara Sulsel sendiri menempati urutan ke 4 dalam konteks kesenjangan RLS yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 3.1 Tabel AHH, RLS, dan PPP Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2017

PROVINSI	AHH		HLS		RLS		PPP (ribu rupiah/tahun)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Sulawesi Utara	69,11	73,01	12,42	12,95	9,1	9,19	14497	9639
Sulawesi Tengah	65,40	69,29	12,82	13,27	8,56	8,00	12980	7710
Sulawesi Selatan	67,96	71,86	12,99	13,59	8,31	7,63	15010	9379
Sulawesi Tenggara	68,57	72,47	13,17	13,54	8,98	7,95	13068	7422
Gorontalo	65,22	69,20	12,54	13,50	6,98	7,56	13552	4995
Sulawesi Barat	62,52	66,23	12,27	12,71	7,55	7,08	12662	6572

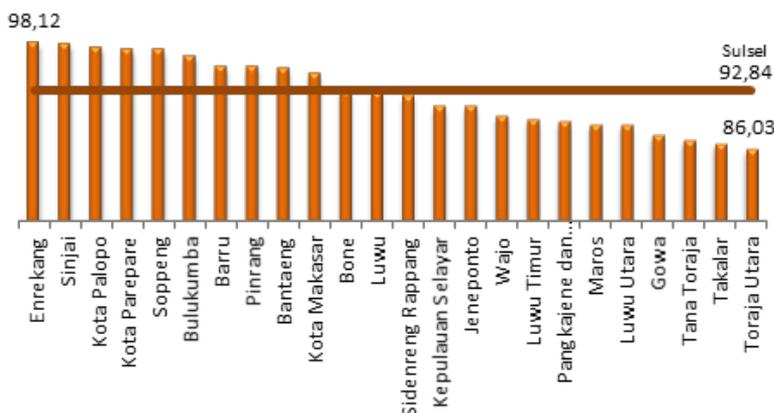
Sumber : www.bps.go.id

Pendapatan yang dianalogikan dengan kemampuan daya beli perempuan Sulsel menempati urutan ke dua setelah Sulut. Kesenjangan dalam PPP ini masih tergolong tinggi untuk pulau Sulawesi, karena range indeksnya berkisar antara 37 hingga 66 persen. Mengingat pada kriteria kesenjangan adalah, semakin mendekati angka 100, maka kesenjangan semakin kecil dan begitu pula sebaliknya, semakin jauh dari angka 100, maka kesenjangan semakin tinggi.

3.3. Pembangunan Gender di Kabupaten/Kota

Pembangunan manusia berbasis gender kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulsel menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Semua kabupaten/kota pada dasarnya punya semangat yang sama dalam upaya meningkatkan pembangunan manusianya berikut kesetaraan. Meski demikian, capaian pembangunan gender masih belum merata di wilayah Sulsel. Nilai IPG kabupaten/kota berada pada range 86,03 hingga 98,12. Enrekang menjadi kabupaten dengan nilai IPG tertinggi di Sulsel di tahun 2017, sementara Toraja Utara merupakan kabupaten dengan nilai IPG terendah.

Melihat elemen pembentuk IPG kabupaten kota, diketahui bahwa penduduk perempuan di Toraja Utara mempunyai angka angka harapan hidup yang paling panjang di Sulawesi Selatan, hampir 75 tahun. Sementara perempuan di Jeneponto mempunyai AHH 67,52 tahun, yang merupakan AHH perempuan terendah di Sulsel. Meski demikian, kesenjangan ekonomi dalam kemampuan daya beli yang berasimilasi dengan pendapatan di Toraja Utara cukup tinggi. Indeks PPP perempuan di Toraja Utara hanya 4,8 juta (terendah di Sulsel) sementara laki-laki 10,63 juta, menyebabkan PPP Toraja Utara menjadi rendah. Akumulasi dari kesenjangan-kesenjangan yang masih tinggi di beberapa indeks pembentuk IPG, menyebabkan Toraja Utara memiliki IPG terendah di Sulsel. Lain halnya dengan Enrekang, sebagai kabupaten yang memiliki IPG tertinggi, dengan



Sumber : www.bps.go.id

Gambar 3.7 Grafik IPG Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

nilai IPG hampir mencapai 100, menunjukkan meratanya pembangunan gender di Enrekang.

Secara umum, kabupaten/kota yang mempunyai IPM tinggi, memiliki capaian IPG yang tinggi pula, kecuali Luwu Timur. Ada 10 kabupaten/kota mempunyai nilai IPG diatas rata-rata IPG Sulsel. Sementara selebihnya masih di bawah rata-rata.

<https://s Sulsel.bps.go.id>

BAB IV

PEMBERDAYAAN GENDER

<https://sulselibps.go.id>

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB IV

PEMBERDAYAAN GENDER

Pemberdayaan secara definisi merupakan proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Inti dari pemberdayaan ini adalah agar masyarakat memperoleh serta memaksimalkan daya, kekuatan, dan kemampuan. Beberapa indikator yang umumnya digunakan dalam mengukur pemberdayaan diantaranya : partisipasi dalam pendidikan, dalam dunia kerja, serta partisipasi dalam jabatan publik.

Sistem patriarki yang mendominasi sebagian besar masyarakat menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mencakup mulai dari ranah personal hingga lainnya. Secara historis, patriarki telah terwujud dalam sosial, budaya, hukum, politik, dan ekonomi dalam berbagai budaya yang berbeda. Upaya pemberdayaan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang gender menjadi langkah penting proses modernisasi masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat.

4.1. Konsep Pemberdayaan Gender

Konsep pemberdayaan gender lebih mengacu pada proses terbukanya kesempatan yang setara ataupun sama. Sesuai dengan konsep UNDP (1995) yang memfokuskan makna pemberdayaan pada opportunity, bukan pada kapabilitas, yang menjadi ukuran *well-being*. Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender dalam konsep pemberdayaan adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perkembangan ketenagakerjaan yang semakin kondusif kontribusinya terhadap perempuan, menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi ranah yang hanya ditujukan untuk laki-laki.

Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Titik beratnya adalah seberapa besar partisipasi perempuan, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Tabel 4.1 Dimensi dan Indikator Pembentuk IDG

Dimensi	Indikator
Keterwakilan di parlemen	Proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi; laki-laki dan perempuan
Distribusi pendapatan	Upah buruh non pertanian; laki-laki dan perempuan

Sumber : www.bps.go.id

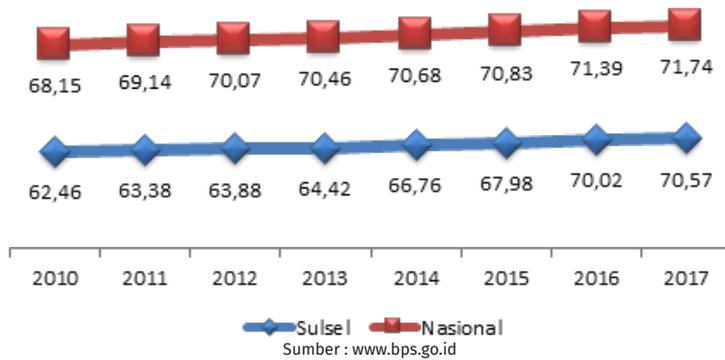
IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Jika IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, maka IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi penduduk yang merata. Penghitungan sumbangan pendapatan untuk IDG sama dengan penghitungan untuk IPG. Selanjutnya masing-masing indeks komponen dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG.

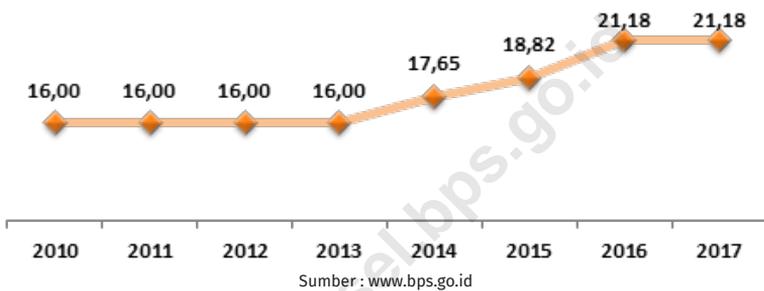
Indikator dalam IDG sebenarnya masih belum mencakup semua ranah kehidupan secara keseluruhan, seperti pada indikator parlemen, dianggap hanya relevan bagi negara maju (Klasen, 2006). Kemudian pada indikator pengambilan keputusan hanya dilihat pada aspek ekonomi semata, padahal ketimpangan gender lebih banyak terjadi pada aspek non-ekonomi seperti pengambilan keputusan dalam rumah tangga (pemilihan menu makanan, pembelian alat-alat rumah tangga, pemeliharaan kesehatan anggota rumah tangga, dan pengaturan pembayaran sekolah). Metode penghitungan IDG memang masih mengacu pada metodologi lama sampai indeks ketidaksetaraan gender (IKG) bisa dihitung. Meski demikian, secara umum indeks pemberdayaan gender tetap dapat memperlihatkan capaian pemberdayaan secara gender yang ada di masyarakat.

4.2. IDG Sulawesi Selatan

Perkembangan IDG Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan dalam 7 tahun terakhir, dan mencapai angka 70.57 di tahun 2017. Meski demikian, angka ini masih di bawah angka IDG nasional (71,74).



Gambar 4.1 Perkembangan IDG Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017



Gambar 4.2 Perkembangan Indeks Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017 (Persen)

Keterwakilan Perempuan di Parlemen

IDG dibangun oleh tiga dimensi, dimensi pertama yaitu indeks keterwakilan perempuan dalam parlemen. Pemberdayaan gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berpolitik. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR DPRD, menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Sementara pada periode 2014-2019 parlemen Sulsel hanya diduduki 16 orang perempuan. Indeks keterlibatan perempuan dalam parlemen di tahun 2017 sebesar 21,18 persen. Meskipun dunia politik di Indonesia masih di dominasi oleh kaum laki-laki, namun angka indeks keterwakilan perempuan periode 2010 hingga 2017 terus mengalami kenaikan. Artinya, meski belum mencapai target, keterlibatan perempuan dalam ranah politik, perlahan tapi pasti semakin terlihat keberadaannya.

Peranan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Budaya yang masih berkembang di Indonesia adalah pemahaman bahwa tanggung jawab perempuan adalah pada sektor rumah tangga atau sektor internal, sementara laki-laki pada sektor publik. Partisipasi perempuan di sektor formal

perlu terus ditingkatkan, agar pemberdayaan perempuan semakin bergerak positif yang akan meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Perkembangan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Sulsel memang berfluktuasi, namun secara umum memiliki gambaran yang positif. Sejak 2011 hingga 2017, angka keterlibatan perempuan Sulsel sudah berada di atas 50 persen. Di tahun 2017, angka indeks telah mencapai 51,62 persen, yang artinya tenaga profesional di Sulsel yang juga berperan sebagai pengambil keputusan telah mengalami kesetaraan gender. Perempuan Sulsel mampu mengejar ketertinggalan dari laki-laki dalam sektor publik.



Gambar 4.3 Perkembangan Indeks Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017 (Persen)

Profesionalisme perempuan yang semakin diperhitungkan di Sulawesi Selatan salah satunya tercermin dalam komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di provinsi Sulawesi Selatan. Komposisi PNS perempuan telah melebihi jumlah PNS laki-laki. Di tahun 2017, dari 26.229 PNS yang ada di Sulsel, proporsi PNS perempuan sekitar 52 persen. Dari 52 persen PNS perempuan tersebut, sekitar 57 persen pegawai golongan III berjenis kelamin perempuan. Golongan III/d atau Penata Tingkat I, merupakan jenjang tertinggi pada golongan III. Sekitar 57 persen PNS yang berada pada jenjang ini berjenis kelamin perempuan. Golongan III merupakan komposisi PNS terbanyak di pemrov Sulsel (51 persen) dari

Tabel 4.2 Jumlah PNS di Pemrov Sulsel Menurut Golongan Kepangkatan 2017

Golongan Kepangkatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Golongan I	172	28	200
Golongan II	1.756	1.252	3.008
Golongan III	5.731	7.656	13.387
Golongan IV	5.045	4.589	9.634
Total	12.704	13.525	26.229

Sumber : www.bps.go.id

seluruh jenjang golongan. Meski pada Golongan IV yang merupakan kepangkatan tertinggi pada jenjang PNS, komposisi perempuan di bawah laki-laki, namun selisihnya tidak begitu signifikan. Secara umum, superioritas perempuan tampak pada ranah pemerintahan.

Posisi Perempuan dalam Distribusi Pendapatan

Kemampuan perempuan dalam penciptaan pendapatan di Sulawesi Selatan secara *trend* terus mengalami peningkatan. Meskipun capaiannya lebih rendah dalam berbagai indikator ekonomi dan tingkat partisipasi tenaga kerja, sumbangan pendapatan perempuan terus mengalami peningkatan dalam periode 2010 hingga 2017. Di tahun 2017, sumbangan pendapatan perempuan berada pada angka 31,63 persen. Angka ini meningkat 0,51 persen dibanding tahun sebelumnya. Kecilnya peran perempuan dalam distribusi pendapatan, berasimilasi dengan status pekerjaan penduduk perempuan yang bekerja. Sebagian besar perempuan bekerja, pada jenis pekerjaan yang tidak dibayar.

Meski mempunyai selisih yang cukup berjarak dengan kontribusi laki-laki, namun peningkatan yang kontinyu dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi positif terhadap perbaikan kondisi kesetaraan gender dalam hal ekonomi di Sulawesi Selatan.

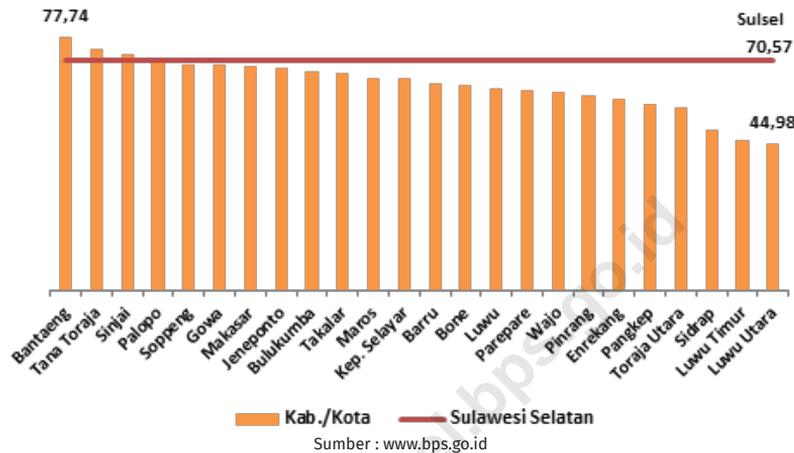


Gambar 4.4 Perkembangan Indeks Perempuan dalam Distribusi Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2017

Sumbangan pendapatan perempuan yang terus meningkat dipengaruhi kualitas pendidikan perempuan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Di tahun 2017, angka partisipasi sekolah penduduk perempuan usia 16-18 tahun (usia SMA) lebih tinggi dibanding laki-laki, dimana APS perempuan sekitar 72 persen, sementara laki-laki sekitar 68 persen. Penduduk perempuan yang berijazah perguruan tinggi juga mempunyai angka persentase yang lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu 11,14 persen, sementara laki-laki 10,3 persen.

4.3. Capaian Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota

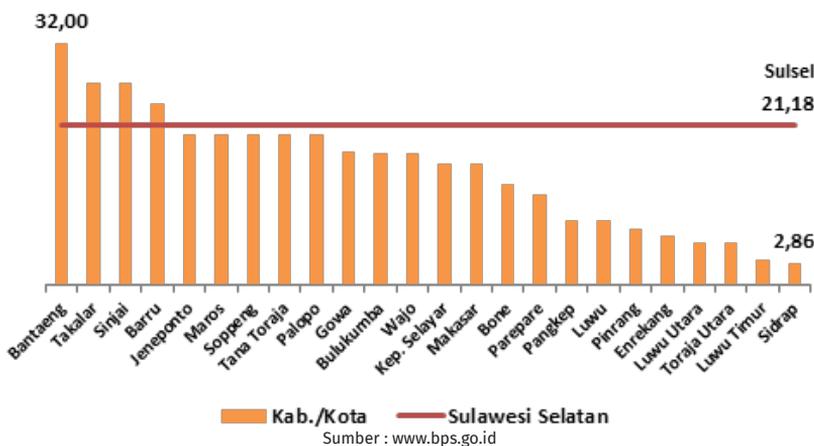
Pembangunan gender pada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mempunyai angka yang bervariasi. Bantaeng merupakan kabupaten dengan IDG tertinggi sebesar 77,74. Sementara Luwu Utara menjadi kabupaten dengan IDG terendah sebesar 44,98. Secara keseluruhan, hanya 4 kabupaten/kota yang berada di atas angka IPG Sulawesi Selatan.



Gambar 4.5 IDG Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Capaian IDG kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tidak lepas dari capaian tiap komponen pembentuknya. Perubahan masing-masing komponen mempengaruhi pergerakan IDG secara keseluruhan.

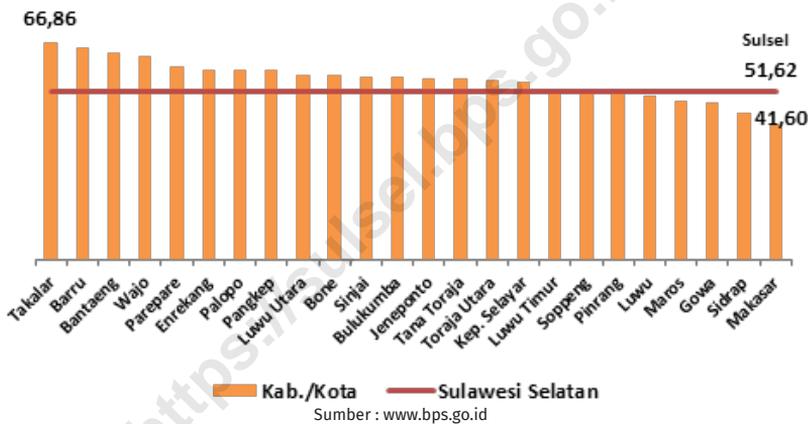
Keterlibatan perempuan dalam parlemen cukup berpengaruh terhadap ketimpangan IDG. Kabupaten Bantaeng sebagai kabupaten dengan nilai IDG tertinggi, memiliki angka indeks keterlibatan perempuan dalam parlemen yang tertinggi pula, bahkan di atas 30 persen. Sementara Sidenreng Rappang (Sidrap)



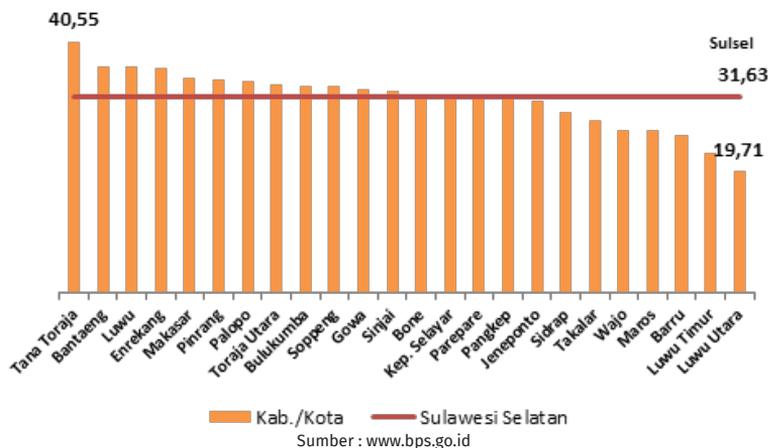
Gambar 4.6 Indeks Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017

memiliki angka indeks keterlibatan perempuan dalam parlemen yang terendah di Sulsel, hanya sekitar 3 persen. Kondisi ini tak lepas dari keberadaan anggota legislatif perempuan di Sidrap yang hanya 1 orang dari 35 anggota DPRD di Kabupaten Sidrap.

Keberdayaan perempuan sebagai tenaga profesional, tampaknya mulai merata di wilayah Sulawesi Selatan. Sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki angka indeks perempuan sebagai pengambil keputusan atau tenaga profesional, diatas rata-rata Sulawesi Selatan (sebanyak 16 kabupaten/kota). Takalar menjadi kabupaten dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang tertinggi (angka indeks 66,86). Sementara Kota Makassar menjadi wilayah di Sulawesi Selatan dengan angka indeks terendah (angka indeks 41,60).



Gambar 4.7 Indeks Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017



Gambar 4.8 Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017

Peranan perempuan Sulawesi Selatan terhadap perekonomian, cukup merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan memiliki indeks distribusi pendapatan diatas rata-rata Sulsel (angka indeks 31,63). Kabupaten Tana Toraja menjadi kabupaten dengan kemampuan indeks sumbangan pendapatan perempuan yang tertinggi dengan angka diatas 40 persen. Meski belum mencapai 50 persen, namun capaian indeks perempuan di Tana Toraja ini telah melampau rata-rata nasional (angka indeks 36,62). Sementara Luwu Utara, menjadi kabupaten dengan kontribusi pendapatan perempuan yang terendah di Sulawesi Selatan (angka indeks 19,71).

<https://s Sulsel.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://sulselib.go.id>

<https://sulsel.bps.go.id>

LAMPIRAN 1

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sulawesi Selatan Tahun 2017

Provinsi/Kab/Kota	IPM		IPG
	L	P	
SULAWESI SELATAN	74,21	68,90	92,84
Kepulauan Selayar	70,66	64,28	90,97
Bulukumba	69,41	67,02	96,56
Bantaeng	68,44	65,21	95,28
Jeneponto	67,47	61,36	90,94
Takalar	70,09	60,81	86,76
Gowa	72,84	63,87	87,69
Sinjai	66,93	65,60	98,01
Maros	73,21	65,09	88,91
Pangkajene dan Kepulauan	72,16	64,41	89,26
Barru	72,34	69,09	95,51
Bone	67,85	62,86	92,65
Soppeng	68,12	66,37	97,43
Wajo	72,89	65,53	89,90
Sidenreng Rappang	73,71	67,97	92,21
Pinrang	72,22	68,93	95,44
Enrekang	71,99	70,64	98,12
Luwu	72,32	66,91	92,52
Tana Toraja	72,01	62,78	87,18
Luwu Utara	71,99	63,98	88,87
Luwu Timur	76,03	68,04	89,49
Toraja Utara	72,30	62,20	86,03
Kota Makassar	83,28	78,87	94,70
Kota Parepare	78,19	76,21	97,47
Kota Palopo	78,17	76,27	97,57

LAMPIRAN 2

Komponen IPG Sulawesi Selatan

Provinsi/Kab/Kota	AHH		HLS		RLS		PPP	
	L	P	L	P	L	P	L	P
SULAWESI SELATAN	67,96	71,86	12,99	13,59	8,31	7,63	15.010	9.379
Kepulauan Selayar	65,78	69,74	12,38	13,21	7,66	6,97	13.483	7.414
Bulukumba	64,94	68,86	12,35	13,09	7,47	7,09	12.680	10.068
Bantaeng	67,94	71,81	11,77	12,34	7,15	6,32	11.014	8.743
Jeneponto	63,66	67,52	12,00	11,92	6,37	5,98	13.481	7.884
Takalar	64,37	68,27	12,21	12,50	7,03	6,55	15.361	6.394
Gowa	67,92	71,86	12,83	13,46	7,95	7,55	13.884	6.065
Sinjai	64,60	68,50	12,84	13,55	7,57	7,03	9.308	8.539
Maros	66,71	70,52	12,97	13,11	7,84	7,16	15.419	7.644
Pangkajene dan Kepulauan	63,87	67,74	12,37	12,45	8,02	6,91	16.919	8.914
Barro	66,26	70,22	13,46	13,79	8,06	7,67	13.167	10.061
Bone	64,22	68,11	12,40	12,88	6,94	6,67	11.908	7.421
Soppeng	66,68	70,64	12,31	12,83	7,57	7,30	10.050	8.680
Wajo	64,52	68,42	12,83	13,60	7,12	6,38	19.260	9.160
Sidenreng Rappang	66,78	70,74	12,49	13,25	7,78	7,34	17.443	9.650
Pinrang	66,64	70,60	12,31	13,97	8,04	7,18	14.601	10.131
Enrekang	68,36	72,29	13,40	14,14	8,75	8,03	10.567	9.847
Luwu	67,57	71,52	12,81	13,67	7,96	7,69	13.383	7.776
Tana Toraja	70,59	74,42	13,22	13,72	8,49	7,77	10.053	4.908
Luwu Utara	65,58	69,53	12,51	12,23	7,67	7,07	15.544	7.893
Luwu Timur	67,76	71,70	12,73	13,18	8,56	7,94	18.509	8.725
Toraja Utara	70,98	74,79	12,92	13,64	8,37	7,50	10.628	4.779
Kota Makassar	69,51	73,39	14,99	15,77	11,36	10,83	19.668	13.110
Kota Parepare	68,67	72,60	14,07	14,63	10,31	9,90	15.066	12.929
Kota Palopo	68,28	72,21	14,08	15,75	10,54	10,30	14.919	11.461

LAMPIRAN 3

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulawesi Selatan Beserta Komponen, 2017

Provinsi/Kab/Kota	Keterlibatan perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
SULAWESI SELATAN	21,18	51,62	31,63	70,57
Kepulauan Selayar	16,00	54,69	31,56	64,74
Bulukumba	17,50	56,04	33,43	67,16
Bantaeng	32,00	63,56	36,58	77,74
Jeneponto	20,00	55,72	30,94	67,93
Takalar	26,67	66,86	27,76	66,60
Gowa	17,78	48,36	32,70	69,01
Sinjai	26,67	56,18	32,67	72,56
Maros	20,00	48,54	26,17	65,16
Pangkajene dan Kepulauan	8,57	58,08	31,49	56,96
Barru	24,00	65,19	25,47	63,54
Bone	13,33	56,82	31,91	62,75
Soppeng	20,00	50,79	33,39	69,35
Wajo	17,50	62,28	26,28	60,62
Sidenreng Rappang	2,860	44,99	28,99	49,02
Pinrang	7,50	50,62	34,51	59,61
Enrekang	6,67	58,33	36,30	58,68
Luwu	8,57	50,24	36,44	61,61
Tana Toraja	20,00	55,58	40,55	73,99
Luwu Utara	5,71	56,83	19,71	44,98
Luwu Timur	3,33	50,86	22,62	45,96
Toraja Utara	5,71	54,99	33,69	56,04
Kota Makassar	16,00	41,60	34,62	68,73
Kota Parepare	12,00	59,48	31,56	61,56
Kota Palopo	20,00	58,31	34,17	70,85

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sulsel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. H. Bau No. 6, Makassar, 90125
Telp.: (0411) 854838, Fax: (0411) 85125
Homepage: <http://sulsel.bps.go.id>
E-mail: bps7300@bps.go.id

ISBN 978-623-7581-03-1

